



# **KEYNOTE SPEECH**

## **MENTERI DALAM NEGERI**

### **RAKERNAS APEKSI XVII TAHUN 2024**

**“KESIAPAN PILKADA 2024, PERENCANAAN  
DAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH”**

Oleh:

**Muhammad Tito Karnavian**

Menteri Dalam Negeri RI

**Balikpapan, 4 Juni 2024**





#bangga  
melayani  
bangsa

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia



# SISTEMATIKA

- I. APEKSI MENGAWAL OTONOMI DAERAH**
- II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024**
- III. ISU-ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH**
- IV. ARAHAN DAN PENEKANAN**



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



Kemendagri\_RI



kemendagri



kemendagri



# I. APEKSI MENGAWAL OTONOMI DAERAH

## HISTORIS UU PEMDA DI INDONESIA

- UUD 1945 → mengamankan otonomi daerah (Pasal 18)
- Amandemen UUD 1945 → mengamankan otonomi daerah

### Masa Reformasi

UU 23/2014 (Efektivitas Pemda)

UU 32/2004 (Mencari Keseimbangan)

UU 22/1999 (Dominan Desentralisasi)

### Masa Orde Baru

UU 5/1974 (Dominan Sentralisasi)

### Masa Orde Lama

UU 18/1965 (Dominan Sentralisasi)

Penetapan Pres. 6/1959 (Dominan Sentralisasi)

UU 1/1957 (Dominan Desentralisasi)

UU 22/1948 (Dominan Desentralisasi)

UU 22/1946 (Dominan Sentralisasi)

### Pra Kemerdekaan

Desentralisasi Wet 1903 (Dominan Sentralisasi)

2014

68  
Th

1946



**APEKSI diharapkan dapat merealisasikan pelaksanaan otonomi** yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota **untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.**

## II. PERSIAPAN PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

### A. LANDASAN KEBIJAKAN



**Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, **ditetapkan tanggal 1 Juli 2016**



#### Pemilihan Kepala Daerah:

1. **37 Gubernur** kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
2. **415 Kabupaten dan 93 Kota**, kecuali 1 Kabupaten dan 5 Kota Administratif di Provinsi DKI Jakarta

**Hasil Kesepakatan Pemerintah, DPR RI, Dan Penyelenggara Pemilu Pada Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada tanggal 24 Januari dan 4 Juni 2022, menghasilkan:**

**Pilkada Serentak 2024 Akan Dilaksanakan → Hari Rabu 27 November 2024\***

\*) Berdasarkan **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024** tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2024)



### TAHUN 2014

Pemilihan Presiden dan Wakil

### TAHUN 2015

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015 dilaksanakan

Oleh **269 Daerah**

Provinsi : 9

Kabupaten : 224

Kota : 36

### TAHUN 2017

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 dilaksanakan

Oleh **101 Daerah**

Provinsi : 7

Kabupaten : 76

Kota : 18

### TAHUN 2018

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018 dilaksanakan

Oleh **171 Daerah**

Provinsi : 17

Kabupaten : 115

Kota : 39

### TAHUN 2019

Pemilihan Presiden dan Wakil

### TAHUN 2020

Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dilaksanakan

Oleh **270 Daerah**

Provinsi : 9

Kabupaten : 224

Kota : 37

## B. TUJUAN PEMILU DAN PILKADA SERENTAK



“  
**PERTAMA KALI  
DILAKUKAN DALAM  
SEJARAH INDONESIA**  
”

## SINKRONISASI PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- ✓ **Terjadi ketidaksinkronan Pemerintahan baik secara vertikal maupun horizontal** karena waktu pemilihan Pemerintahan memiliki 2 skema yang berbeda.
- ✓ Keinginan untuk dilaksanakannya Pilkada serentak di seluruh Indonesia **agar terjadi paralel masa Pemerintahan** di tingkat Pusat (Presiden) dengan Pemerintahan Provinsi (Gubernur dan DPRD Provinsi) dan dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota);





## C. STRATEGI MEMBANGUN SINERGI ELEMEN PENDUKUNG KEBERHASILAN PILKADA SERENTAK 2024

### MASYARAKAT

- Selaku pemilih harus mejadi aktor utama terwujudnya Pemilihan yang bebas dari politik uang;
- Mendorong terwujudnya suasana Pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar
- Masyarakat harus datang ke TPS, karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah
- Masyarakat juga meliputi masyarakat dan kelompok yang berada di desa

### MEDIA/PERS

- Pemberitaan yang akurat, berimbang dan tidak hoax

Partai Politik, Paslon, dan Pendukung:

- Mendeklarasikan taat prosedur dan mekanisme Pemilihan;
- Mengikuti proses pemilihan dgn baik, siap menang dan siap kalah; dan
- Menjauhi politik uang, *black campaign*, hoaks dan kecurangan lainnya.

### PARPOL & PASLON

### PENYELENGGARA

(KPU)



KPU, Bawaslu dan DKPP :

- Harus *on the track* pada tugas, fungsi dan kewenangannya;
- Bertindak netral dan berintegritas; dan
- Menjamin hak pilih setiap masyarakat.

### PENGAWAS

(BAWASLU, DKPP, LEMBAGA NON BAWASLU)

### PEMERINTAH PUSAT & PEMERINTAH DAERAH:

- Memberikan dukungan penyelenggaraan;
- Dukungan Keamanan;
- Menjamin ketersediaan anggaran; dan
- Memberikan fasilitasi bagi penyelenggara, peserta dan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan.

### APARAT KEAMANAN

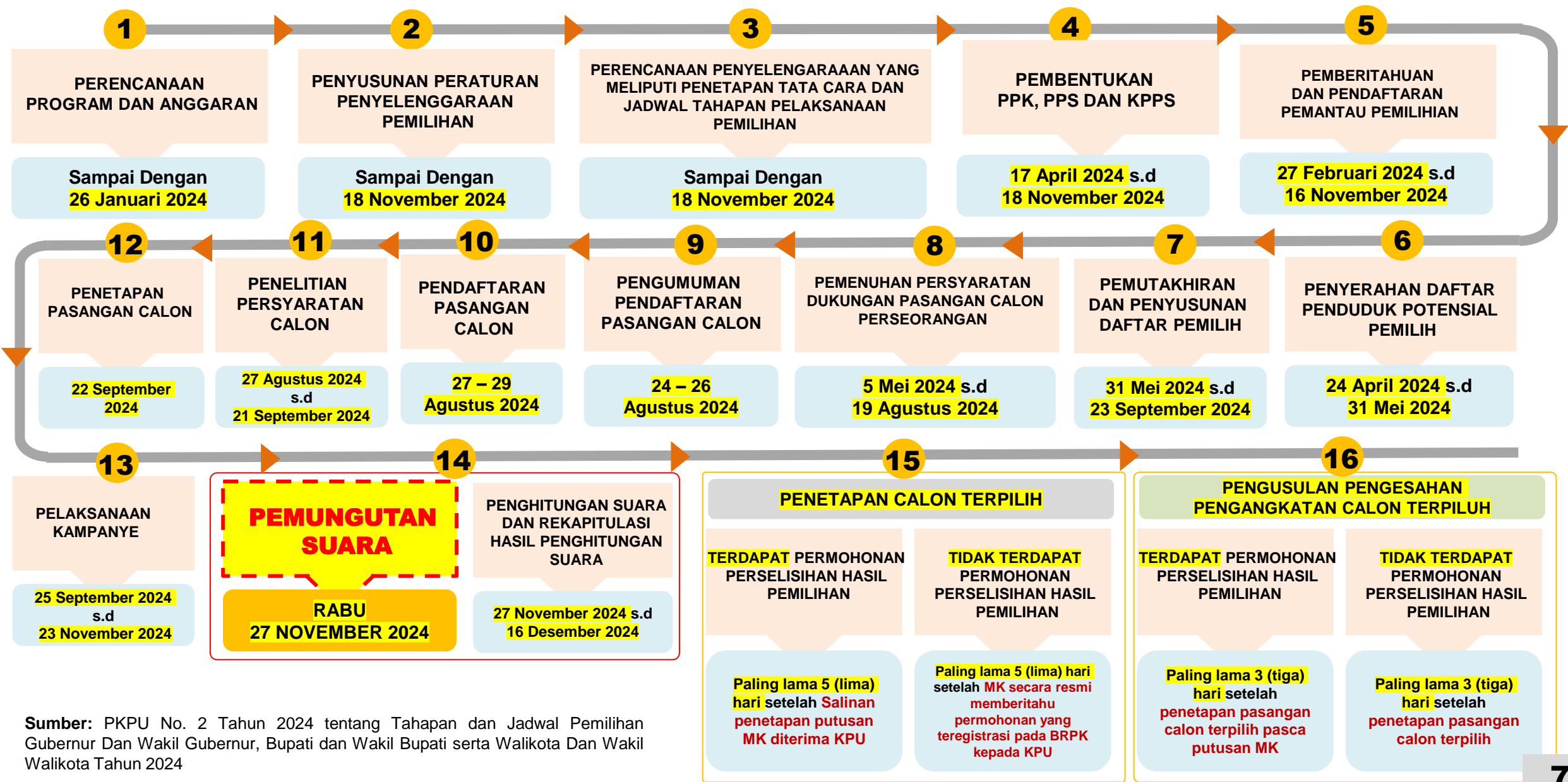
(TNI/POLRI, SATPOL PP, SATLINMAS)

Keterangan:

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
NGO	: Non Governmental Organization
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
Parpol	: Partai Politik
Bacaleg	: Bakal Calon Legislatif
Paslon	: Pasangan Calon
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

# D. TAHAPAN DAN JADWAL PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

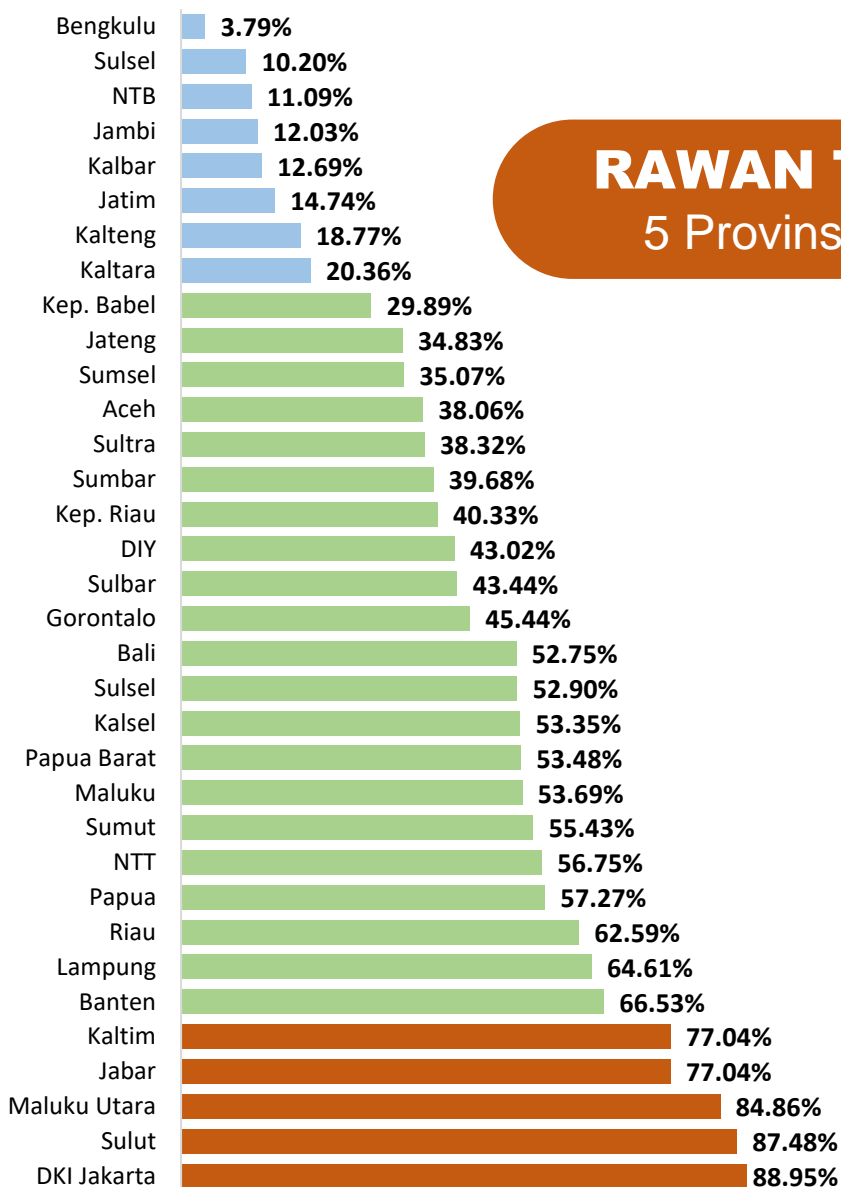
## PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024



Sumber: PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024



## E. TINGKAT KERAWANAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



### RAWAN TINGGI

5 Provinsi (15%)

### RAWAN SEDANG

21 Provinsi (62%)

### RAWAN RENDAH

8 Provinsi (24%)

### Strategi Antisipasi Kerawanan:

- Lakukan Analisa Kerawanan** daerah terhadap potensi Gangguan Keamanan
  - Kelompok Bersenjata (KKB di Papua)
  - Daerah dengan potensi bentrok
- Back Up** dilaksanakan oleh satuan atas
- Pembagian fokus Wilayah pengamanan di Papua**
- BKO anggota daerah aman ke Daerah Rawan**

\*) Belum termasuk 4 DOB Papua





# TINGKAT INDEKS KERAWANAN PEMILU (IKP) KABUPATEN/KOTA

## RAWAN TINGGI

85 Kab/Kota (16,54%)

## RAWAN SEDANG

349 Kab/Kota (67,90%)

## RAWAN RENDAH

80 Kab/Kota (15.56%)

### DAFTAR KABUPATEN/KOTA RAWAN TINGGI

NO	KAB/KOTA	SKOR IKP	NO	KAB/KOTA	SKOR IKP	NO	KAB/KOTA	SKOR IKP	NO	KAB/KOTA	SKOR IKP	NO	KAB/KOTA	SKOR IKP
1	Kab. Intan Jaya	100	18	Kab. Purworejo	67.11	35	Kab. Lombok Tengah	61.23	52	Kab. Nabire	56.28	69	Kab. Banggai	52.66
2	Kab Jayawijaya	100	19	Kab. Simeulue	67.07	36	Kab. Batang Hari	61.18	53	Kab. Tuban	56.21	70	Kab. Pasaman Barat	52.66
3	Kab. Bandung	91.59	20	Kab Kotabaru	65.52	37	Kab. Mimika	61.18	54	Kab. Bojonegoro	55.76	71	Kab. Ketapang	52.27
4	Kab. Yalimo	86.66	21	Kab. Tasikmalaya	65.42	38	Kab. Fakfak	61.04	55	Kota Bekasi	55.48	72	Kab. Sampang	52.19
5	Kab. Mapi	82.13	22	Kota Jakarta Timur	65.14	39	Kab. Bandung Barat	59.93	56	Kab. Mamuju	54.90	73	Kab. Alor	51.83
6	Kota Banjar Baru	80.14	23	Kab. Kep. Yapen	64.93	40	Kab. Memberamo Tengah	59.68	57	Kota Parepare	54.69	74	Kab. Bolaang Mongondow Utara	51.75
7	Kab. Jayapura	78.05	24	Kab. Cirebon	64.79	41	Kab Nias Selatan	59.65	58	Kab. Lampung Tengah	54.65	75	Kab. Kutai Kartanegara	51.49
8	Kab. Pandeglang	77.74	25	Kab. Sleman	64.56	42	Kab. Nduga	59.55	59	Kab. Sarmi	54.34	76	Kota Tasikmalaya	51.28
9	Kab. Labuhan Batu Utara	76.29	26	Kab. Halmahera Tengah	64.19	43	Kab. Temanggung	59.05	60	Kab. Magelang	54.25	77	Kab. Pacitan	51.17
10	Kab Malaka	76.03	27	Kab. Malang	64.01	44	Kab. Lebak	58.78	61	Kab. Pasangkayu	54.21	78	Kab. Kuningan	51.10
11	Kota Ternate	75.30	28	Kab. Agam	63.96	45	Kota Sungai Penuh	58.67	62	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	54.04	79	Kab. Konawe Selatan	50.68
12	Kota Semarang	73.26	29	Kab. Kediri	63.40	46	Kab. Wonosobo	58.35	63	Kota serang	53.32	80	Kab. Cianjur	50.65
13	Kab. Tolikara	72.51	30	Kab. Puncak	63.23	47	Kab. Aceh selatan	57.75	64	Kab.Kendal	53.25	81	Kota Kotamobagu	50.65
14	Kab. Sukoharjo	70.20	31	Kab. Bulukumba	63.19	48	Kab. Sumba Timur	57.52	65	Kab. Banyuasin	53.19	82	Kab. Kutai Barat	50.33
15	Kab Banggai Kepulauan	67.72	32	Kab. Timor Tengah Selatan	63.03	49	Kab. Kerinci	57.42	66	Kab. Nanga Raya	53.03	83	Kab. Muna	49.91
16	Kab. Lombok Timur	67.57	33	Kota Bandar Lampung	62.90	50	Kota Jaya Pura	56.64	67	Kab. Sekadau	52.78	84	Kab. Asmat	49.47
17	Kab. Majalengka	67.14	34	Kab. Pidie	61.80	51	Kab. Sigi	56.38	68	Kab. Wakatobi	52.73	85	Kab. Janeponto	49.38

Terdapat **11 Kota** Rawan Tinggi



## F. DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4) PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024



Jakarta, 2 Mei 2024

Jumlah DP4:

**207.110.768**

(Per 27 November 2024)



**Laki-Laki**

**103.228.748 Jiwa**



**Perempuan**

**103.882.020 Jiwa**

### Dinamika data kependudukan sangat tinggi:

Rata-rata **penerbitan akta kematian**  
per bulan selama tahun 2023

**165.758 Jiwa**

Rata-rata **peristiwa pindah datang**  
per bulan selama tahun 2023 sejumlah

**676.856 Jiwa**

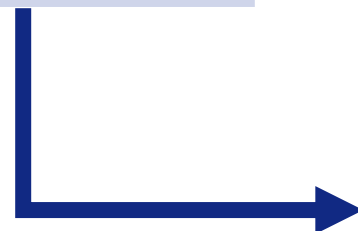
serta adanya  
**perubahan pekerjaan**  
**TNI/Polri**



## G. DAFTAR WALIKOTA DEFINITIF DAN PJ WALIKOTA

### JUMLAH DAFTAR WALIKOTA

JUMLAH WALIKOTA DEFINITIF	JUMLAH PJ WALIKOTA
<b>38</b>	<b>55</b>



### RINCIAN PJ WALIKOTA SESUAI INSTANSI ASAL

No.	Instansi Asal	Jumlah PJ Walikota
1.	Pejabat Provinsi	27
2.	Sekda Kota	14
3.	Kemendagri	10
4.	Sekda Kabupaten	1
5.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
6.	Kemenko Maritim dan Investasi	1
7.	Kemenkumham	1
TOTAL		55







## G. KEBIJAKAN PENDANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

### PEMILU

#### Undang-Undang No. 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum  
(Ditetapkan 15 Agustus 2017)

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk **memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden**, dan untuk memilih **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

#### Pasal 451 Ayat (2)

Dana penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu wajib dianggarkan kedalam

**APBN**

### PILKADA

#### Undang-Undang No. 10 Tahun 2016

Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang **Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota** menjadi Undang-Undang  
(Ditetapkan 1 Juli 2016)

#### Pasal 166 Ayat (1)

Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dibebankan pada


**APBD**



## SURAT EDARAN MENDAGRI NOMOR 900.1.9.1/435/SJ

# TANGGAL 24 JANUARI 2023 TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

### Mendorong Pemda Menganggarkan dan Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

  
MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Januari 2023  
Yth. 1. Gubernur,  
2. Bupati/Wali Kota,  
di:  
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR 900.1.9.1/435/SJ  
TENTANG  
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

Sesuai amanat Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bahwa pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam rangka menjamin kepastian tersedianya pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 yang merupakan Program Strategis Nasional, disampaikan sebagai berikut:

A. Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

Kepala Biro Hukum,  
R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001

Wali Kota melaporkan perkembangan  
Bupati/Wali Kota kepada Gubernur dan  
Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil  
Wali Kota melalui Direktur Jenderal  
Pengembangan dan Penguatan  
Kecamatan dan Kelurahan  
Setelah selesai, disampaikan kepada  
Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali  
Kota dan Wakil Wali Kota.

MENTERI DALAM NEGERI,  
ttd  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Keselamatan,  
Kepala Biro Hukum,  
R. Gani Muhamad, SH., M.AP  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196908181996031001

- **Memastikan alokasi anggaran** kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024** dalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, **untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan** Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada **TA 2023 sebesar 40% dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60%** dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.



PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN  
PENYALURAN DANA HIBAH PILKADA KEPADA KPUD DAN BAWASLU TAHUN 2024



## DATA NASIONAL

NO	KPU	
1	Yang telah NPHD	541 Pemda
2	Yang belum NPHD	-
3	Jumlah anggaran NPHD	Rp. 28.76T
4	Realisasi NPHD	Rp. 13.20T
5	Jumlah Pemda telah Realisasi	541 Pemda
6	Jumlah Pemda belum Realisasi	0 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	83 Pemda

## DATA KOTA SE-INDONESIA

NO	KPU	
1	Yang telah NPHD	93 Pemda
2	Yang belum NPHD	-
3	Jumlah anggaran NPHD	Rp. 3.28T
4	Realisasi NPHD	Rp. 1.50T
5	Jumlah Pemda telah Realisasi	93 Pemda
6	Jumlah Pemda belum Realisasi	0 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	13 Pemda

## DATA NASIONAL

NO	BAWASLU	
1	Yang telah NPHD	518 Pemda
2	Yang belum NPHD	23 Pemda
3	Jumlah anggaran NPHD	Rp. 8.63T
4	Realisasi NPHD	Rp. 3,87T
5	Jumlah Pemda telah Realisasi	510 Pemda
6	Jumlah Pemda belum Realisasi	31 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	95 Pemda

## DATA KOTA SE-INDONESIA

NO	BAWASLU	
1	Yang telah NPHD	88 Pemda
2	Yang belum NPHD	5 Pemda
3	Jumlah anggaran NPHD	Rp. 917M
4	Realisasi NPHD	Rp. 425M
5	Jumlah Pemda telah Realisasi	87 Pemda
6	Jumlah Pemda belum Realisasi	6 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	12 Pemda

Sumber Data: Dihimpun oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah Daerah (data bergerak) per 2 Juni 2024, 16.00 WIB





PEMERINTAH DAERAH YANG TELAH MELAKUKAN PENYALURAN PENDANAAN  
PENGAMANAN PILKADA TNI DAN POLRI

DATA NASIONAL

NO	TNI	
1	Yang sudah NPHD	150 Pemda
2	Yang belum NPHD	396 Pemda
3	Alokasi anggaran NPHD	Rp. 377.62M
4	Realisasi NPHD	Rp. 138,77M
5	Jumlah Pemda telah Realisasi	51 Pemda
6	Jumlah Pemda belum Realisasi	495 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	3 Pemda

DATA KOTA SE-INDONESIA

NO	TNI	
1	Yang sudah NPHD	35 Pemda
2	Yang belum NPHD	58 Pemda
3	Alokasi anggaran NPHD	Rp. 62.27M
4	Realisasi NPHD	Rp. 14.01M
5	Jumlah Pemda telah Realisasi	9 Pemda
6	Jumlah Pemda belum Realisasi	84 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	- Pemda

DATA NASIONAL

NO	POLRI	
1	Yang sudah NPHD	170 Pemda
2	Yang belum NPHD	376 Pemda
3	Alokasi anggaran NPHD	Rp. 1.226T
4	Realisasi NPHD	Rp. 410,61M
5	Pemda Telah Realisasi	65 Pemda
6	Pemda Belum Realisasi	481 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	10 Pemda

DATA KOTA SE-INDONESIA

NO	POLRI	
1	Yang sudah NPHD	30 Pemda
2	Yang belum NPHD	63 Pemda
3	Alokasi anggaran NPHD	Rp. 164M
4	Realisasi NPHD	Rp. 30,58M
5	Pemda Telah Realisasi	10 Pemda
6	Pemda Belum Realisasi	83 Pemda
7	Jumlah Pemda Realisasi <40%	1 Pemda



Lanjutan...



## H. DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA KEPADA KPUD DAN BAWASLU DAERAH

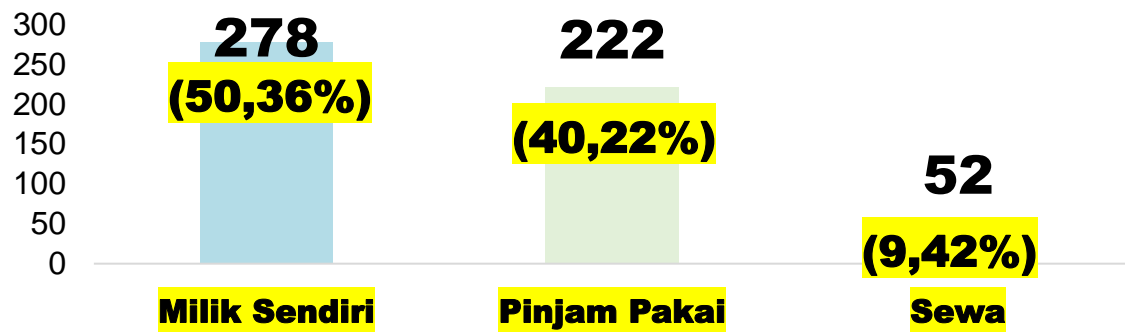
### DATA GEDUNG KANTOR KPU DAN BAWASLU



Total Jumlah  
Satker KPU di  
Daerah : **552**

Total Jumlah  
Aset Gedung  
KPU di Daerah : **552**

Status Aset Gedung Kantor KPU Se Indonesia



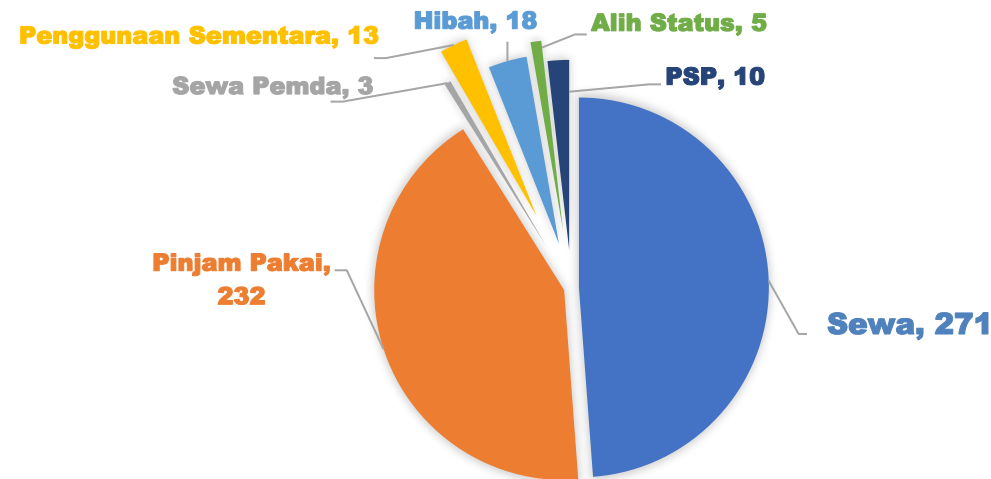
- Dari 552 Satuan Kerja KPU di Daerah, Sebanyak **5 kantor KPU** dalam **kondisi Rusak Berat** yakni Pamekasan, Luwu, Kolaka Utara, Timor Tengah Utara, dan Klungkung dengan status **Milik Sendiri**.
- Saat ini Kantor KPU Pamekasan **menggunakan bekas Gudang** yang **direnovasi**, KPU Luwu **mengontrak Ruko**, KPU Kolaka Utara **renovasi sementara**, KPU Timor Tengah Utara menggunakan **kantor sementara**, KPU Klungkung **menyewa gedung**.



Total Jumlah  
Satker  
Bawaslu di  
Daerah : **552**

Total Jumlah  
Aset Gedung  
Bawaslu di  
Daerah : **552**

Status Aset Gedung Kantor Bawaslu Se Indonesia



#### Keterangan:

Sewa : **271**  
Pinjam Pakai : **232**  
Sewa Pemda : **3**  
Hibah : **18**

Penggunaan Sementara : **13**  
Alih Status : **5**  
Penetapan Status Penggunaan (PSP) : **10**



## I. DATA SATPOL PP DAN SATLINMAS

**Satpol PP dan Linmas untuk bekerja sama dengan Polri dan TNI** untuk menjaga stabilitas keamanan kesiapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di daerah masing-masing



**Total Jumlah Anggota  
Satpol PP Seluruh  
Indonesia**

**: 105.872**

**Orang/Personil**

**PNS**

**29.895**

**NON PNS**

**75.977**

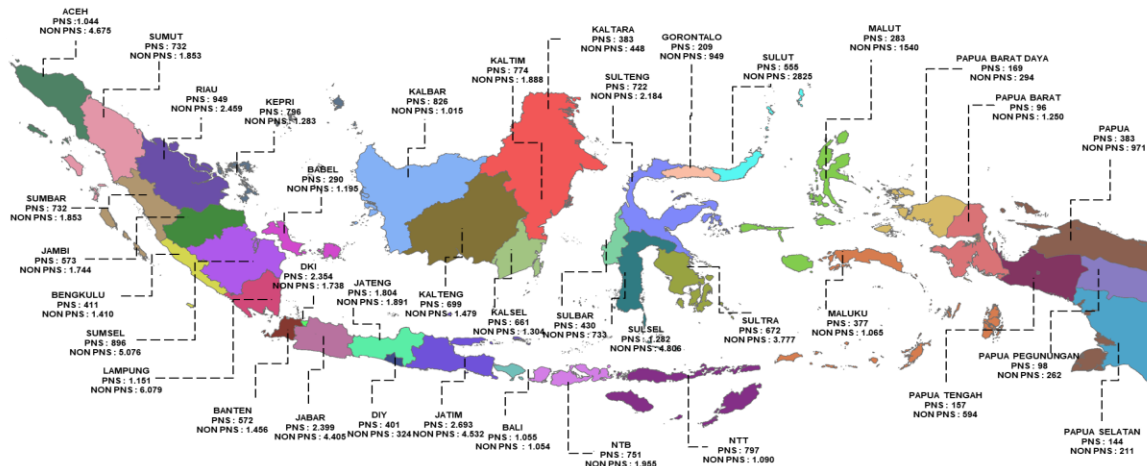


**Total Jumlah Anggota  
Satlinmas Seluruh  
Indonesia**

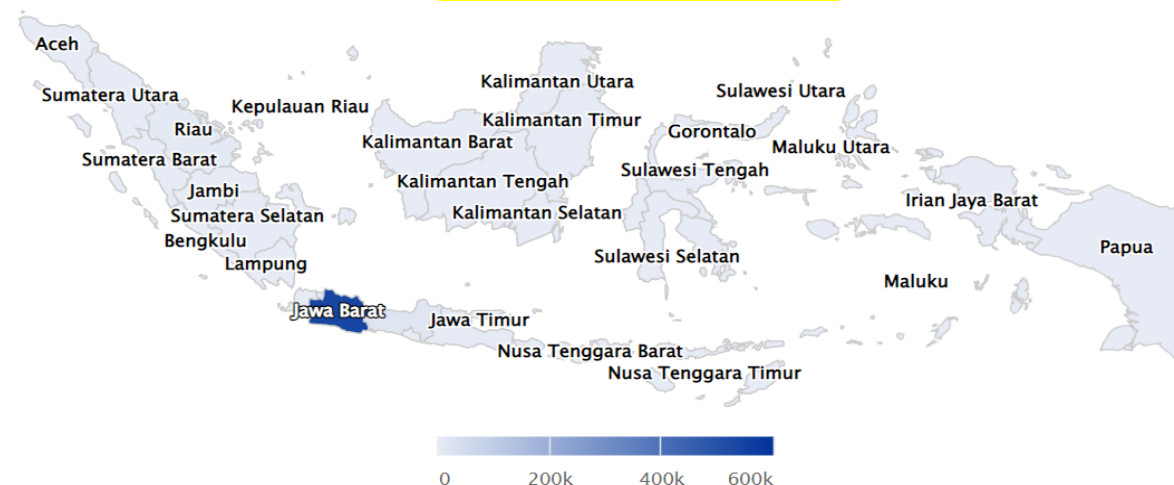
**: 1.224.990**

**Orang/Personil**

**Data Jumlah dan Sebaran  
Satpol PP Se- Indonesia**



**Proporsi Sebaran Jumlah  
Satlinmas Se- Indonesia**



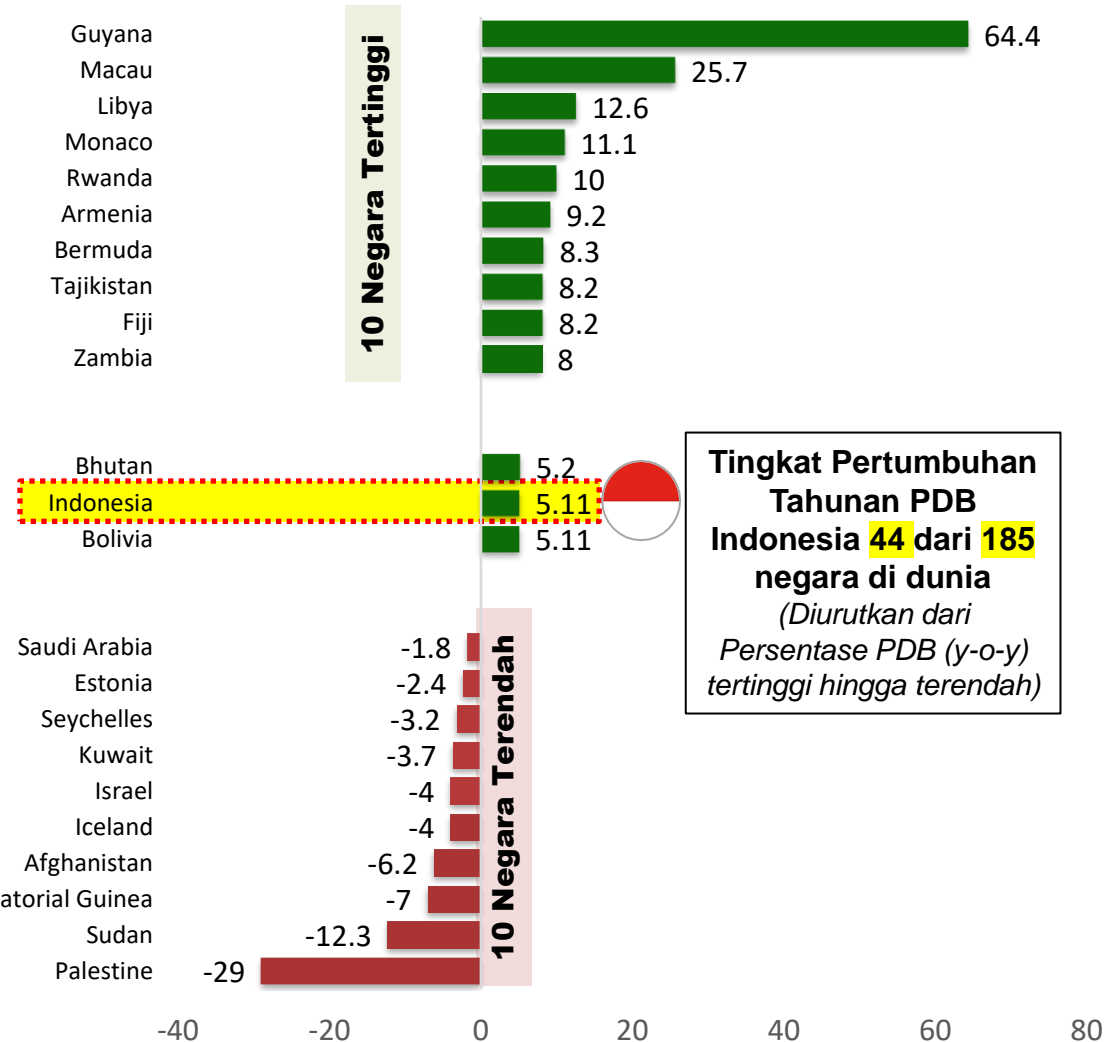


### III. ISU-ISU STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

#### A. PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA DAN POSISI INDONESIA

##### Tingkat Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Dunia

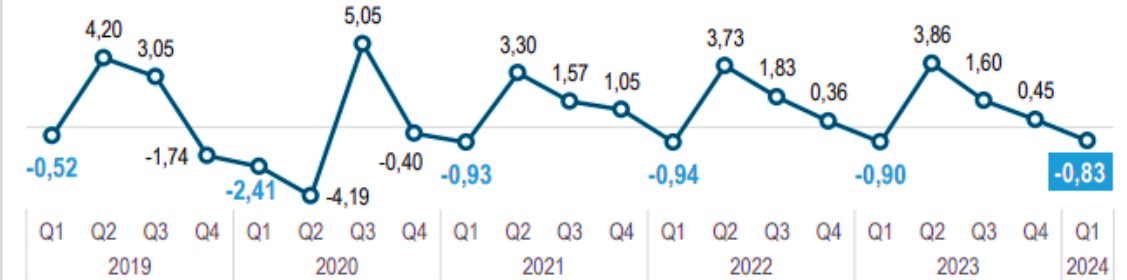
Triwulan 1 Tahun 2024 y-o-y (%)



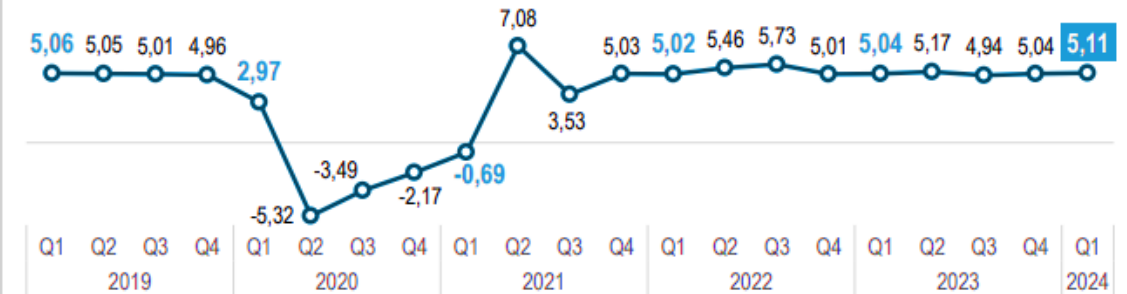
##### Tren Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Triwulan 1 Tahun 2024

###### Laju Pertumbuhan Ekonomi (% q-to-q)



###### Laju Pertumbuhan Ekonomi (% y-on-y)



- Dibandingkan Triwulan 4-2023, **ekonomi Indonesia pada Triwulan 1-2024 berkontraksi sebesar 0,83%** (q-to-q), mengikuti pola musiman tahun-tahun sebelumnya.
- Ekonomi Indonesia tumbuh positif sebesar 5,11% pada Triwulan 1-2024, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2023.**



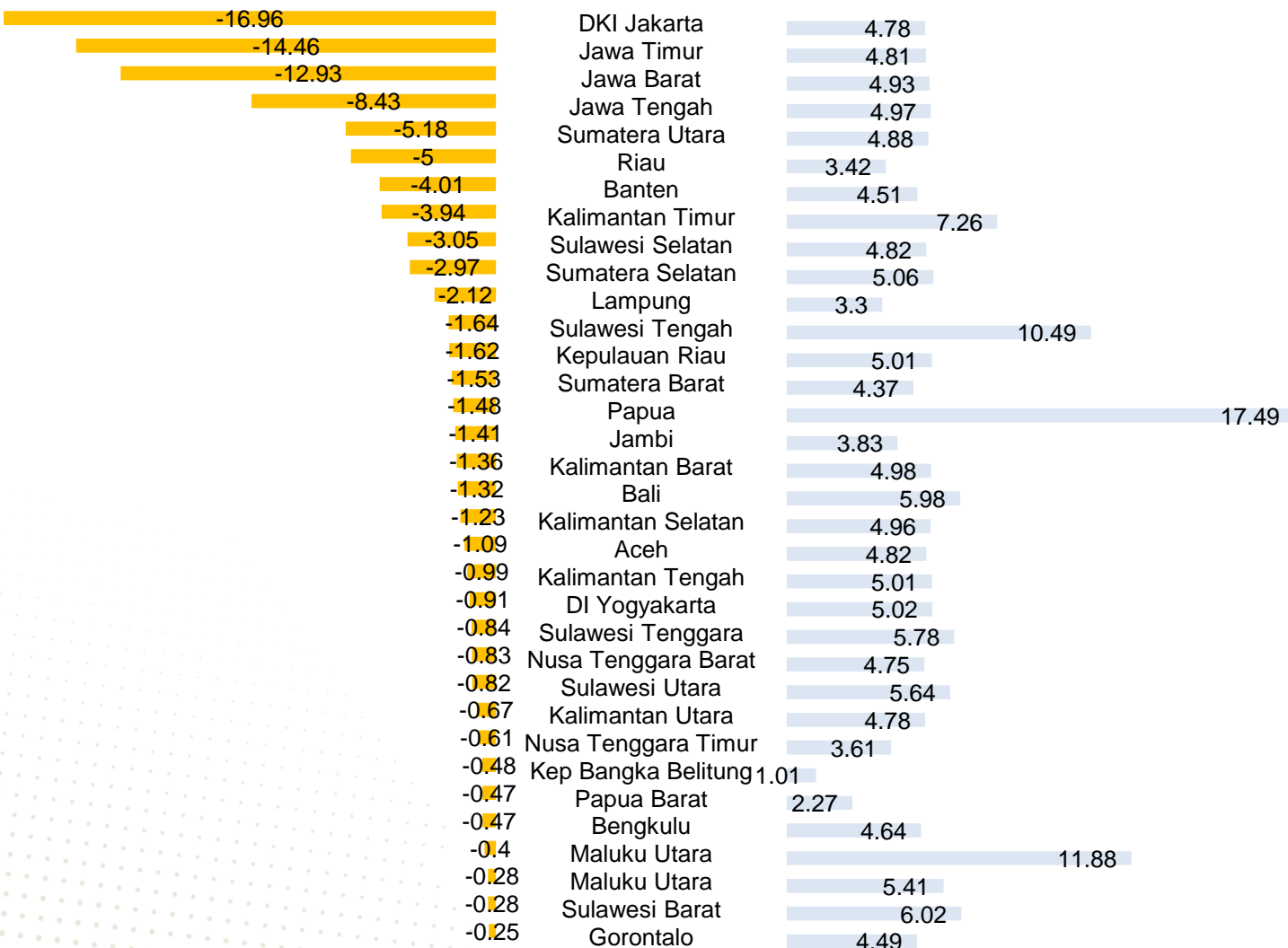
Lanjutan...



## PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) MENURUT PROVINSI

Triwulan 1-2024 (y-on-y)

■ Share [%] ■ Pertumbuhan Konstruksi [%]



### Share Tertinggi

- ▶ DKI Jakarta (16,96%)
- ▶ Jawa Timur (14,46%)
- ▶ Jawa Barat (12,93%)

### Pertumbuhan Tertinggi

- ▶ Papua (17,49%)
- ▶ Maluku Utara (11,88%)
- ▶ Sulawesi Tengah (10,49%)

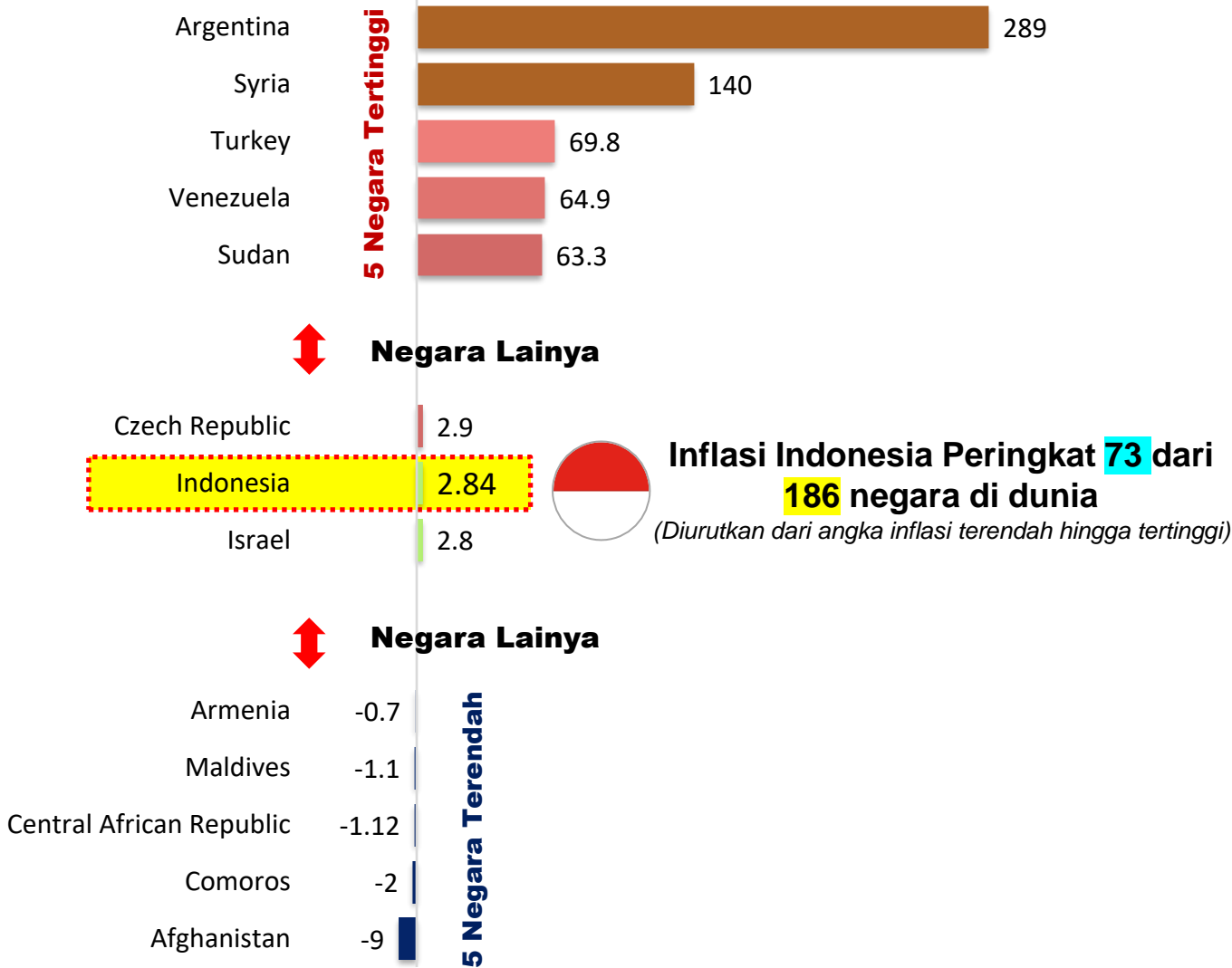
### Keterangan:

Angka share merupakan proporsi nilai PDRB suatu Provinsi terhadap total nilai PDRB ADHB 34 Provinsi



# PERKEMBANGAN INFLASI GLOBAL DAN INDONESIA

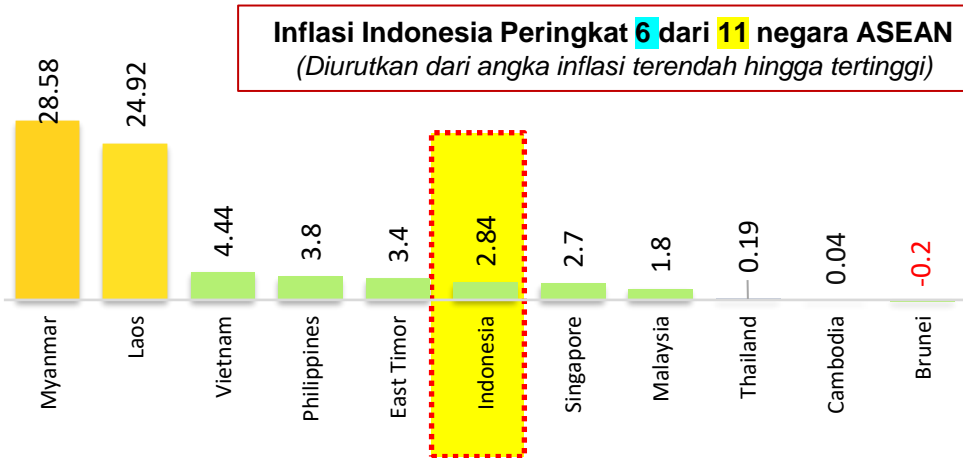
Tingkat di Inflasi Berbagai negara di urutan berdasarkan **Inflasi Terendah** per Mei 2024 (%)



Tingkat di Inflasi **negara G20** di urutan berdasarkan **Inflasi Terendah** per Mei 2024 (%)



Tingkat di Inflasi **negara ASEAN** di urutan berdasarkan **Inflasi Terendah** per Mei 2024 (%)

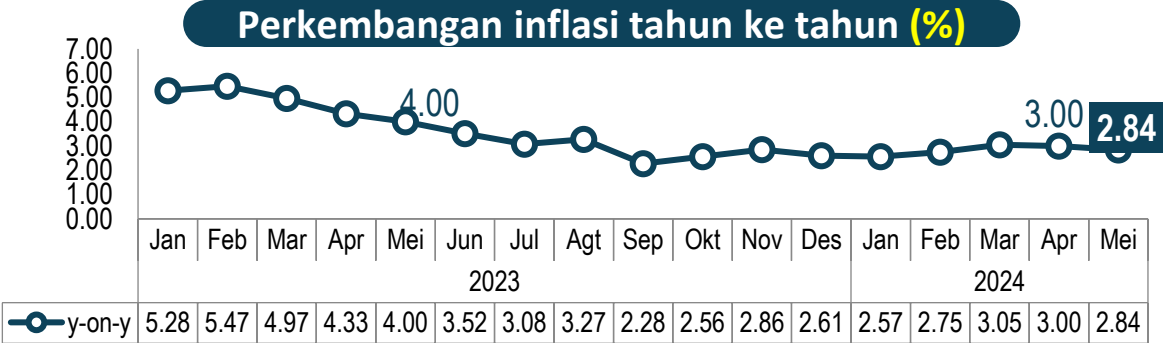




PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL (BULAN MEI 2024)

Inflasi Tahun ke Tahun  
(Mei 2024 terhadap Mei 2023)

2,84%

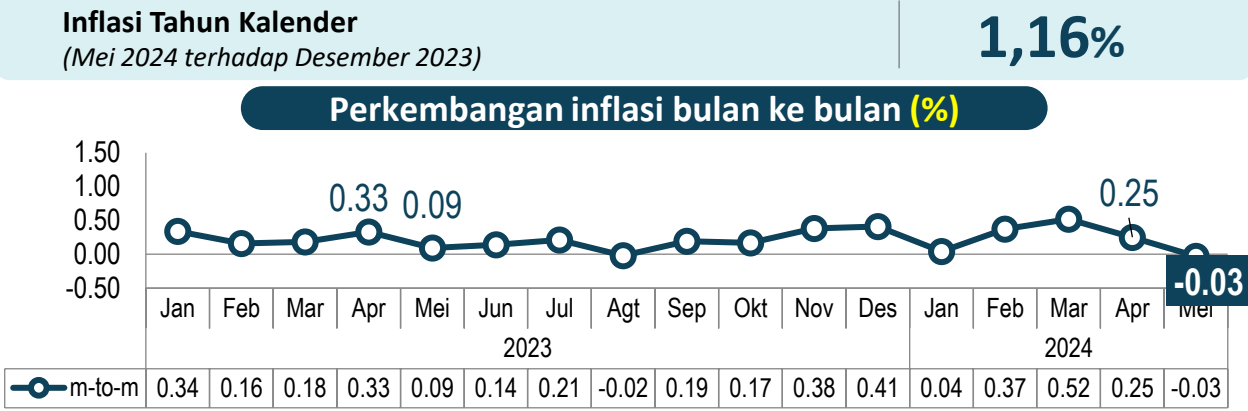


Inflasi Berdasarkan Kelompok (y-on-y, %)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
INFLASI UMUM	2,84	2,84
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	6,18	1,75
2. Pakaian dan Alas Kaki	1,10	0,06
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,54	0,09
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,85	0,04
5. Kesehatan	2,06	0,06
6. Transportasi	1,34	0,17
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,16	-0,01
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	1,60	0,03
9. Pendidikan	1,71	0,09
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	2,51	0,25
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,99	0,31

Inflasi Bulan ke Bulan  
(Mei 2024 terhadap April 2024)

-0,03%



Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran (m-to-m, %)

Rincian	Inflasi	Andil Inflasi
Inflasi Umum	-0,03	-0,03
1. Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0,29	-0,08
2. Pakaian dan Alas Kaki	-0,04	~0
3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,08	0,01
4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,05	~0
5. Kesehatan	0,04	~0
6. Transportasi	-0,36	-0,04
7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,05	~0
8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,10	~0
9. Pendidikan	~0	~0
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0,26	0,03
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,87	0,05



Lanjutan...

# KONDISI INFLASI PROVINSI DAN KAB/KOTA

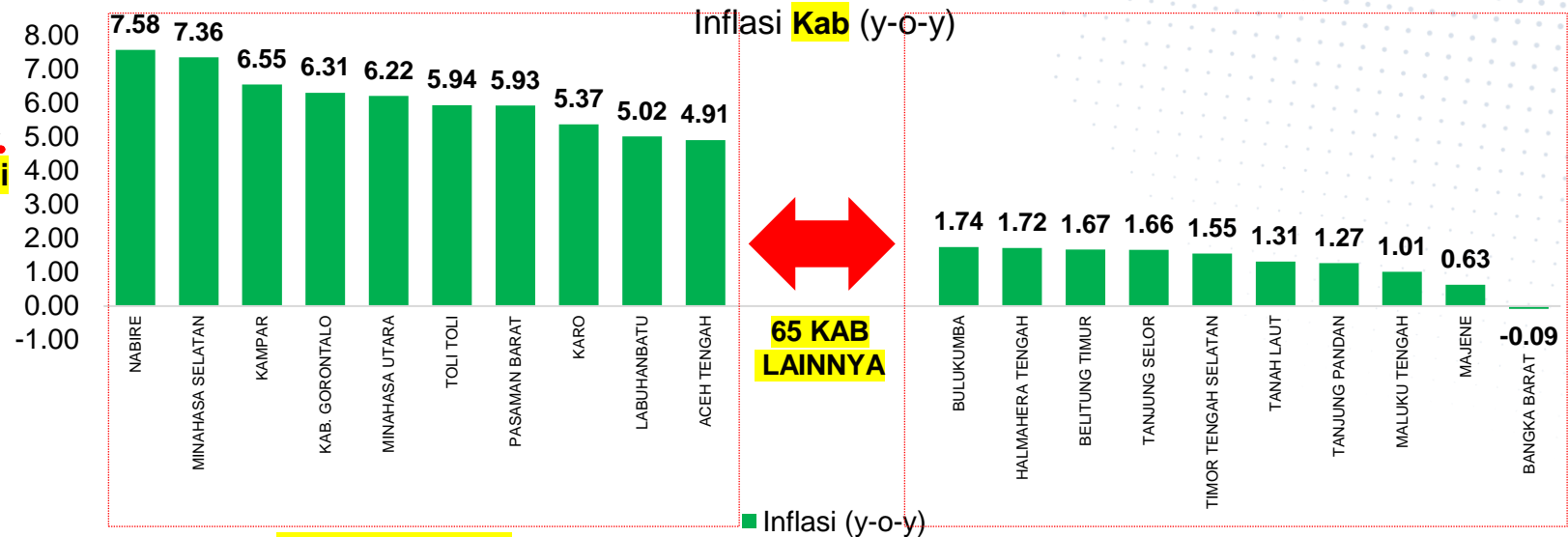
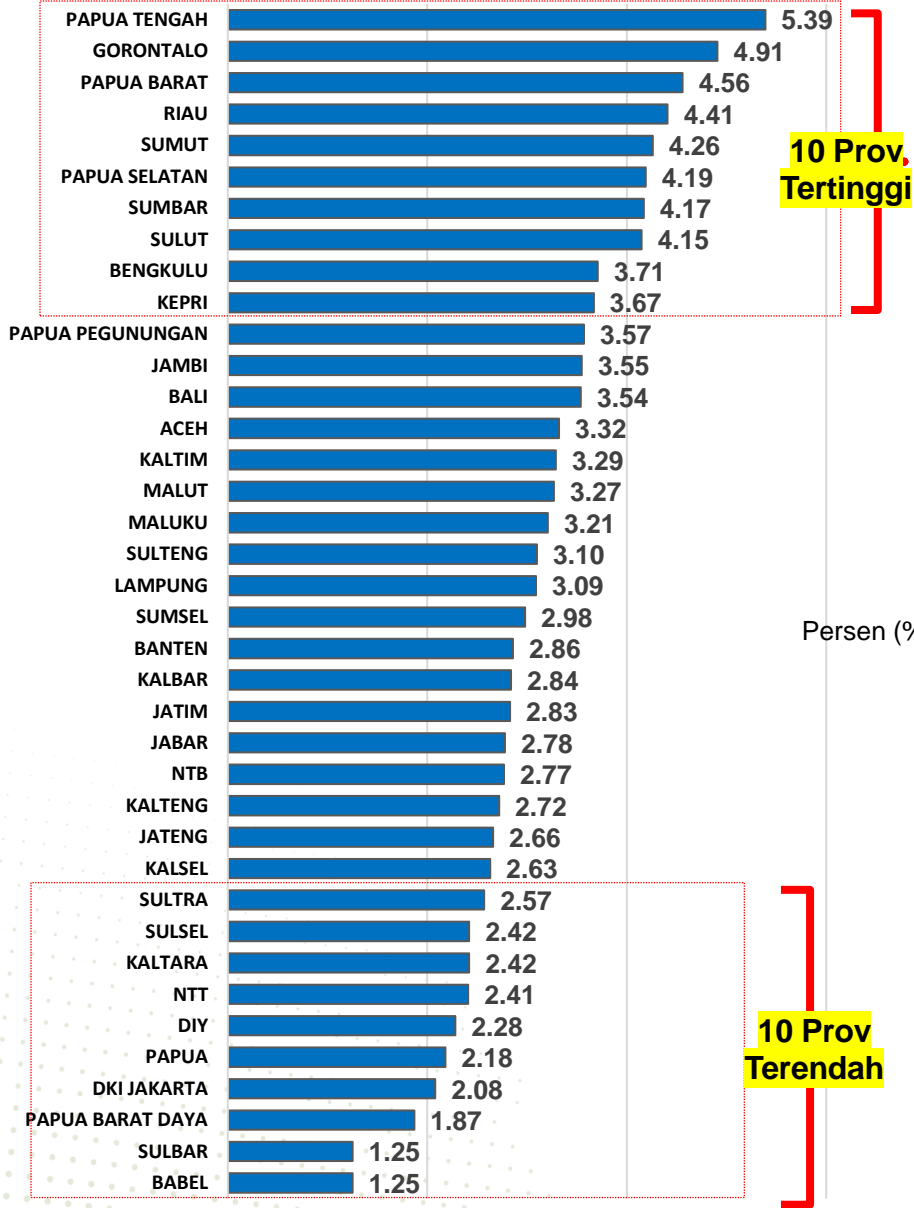
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia



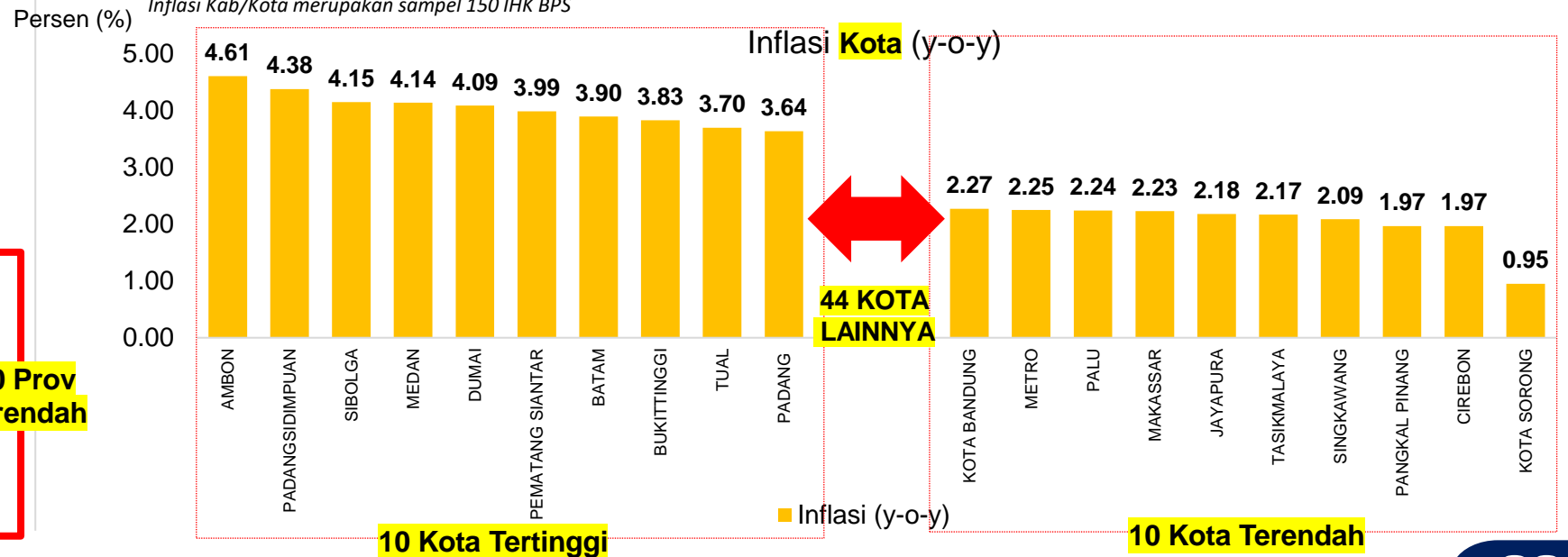
## Inflasi Per-Provinsi (y-o-y)

Persen (%)

## BULAN MEI 2024

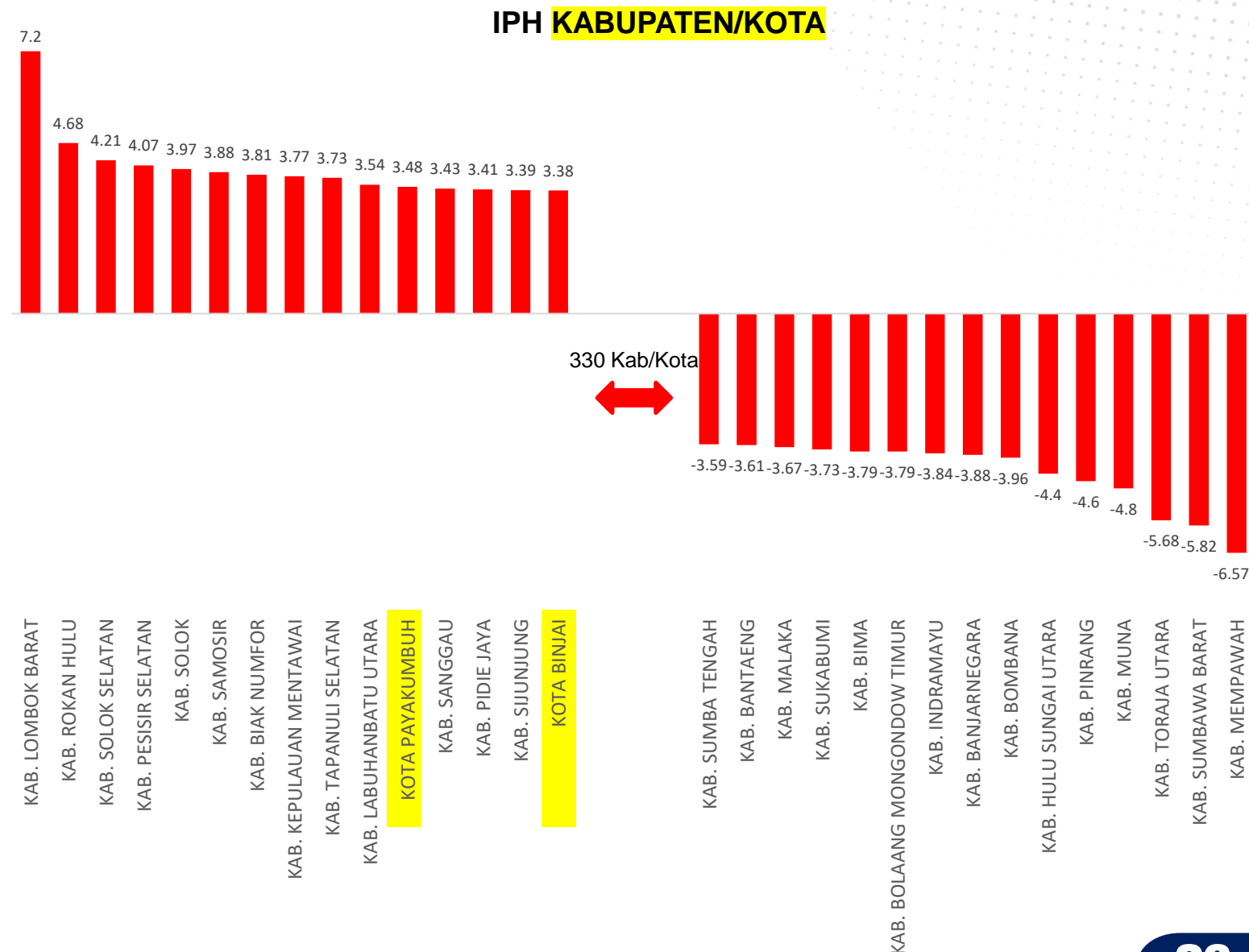
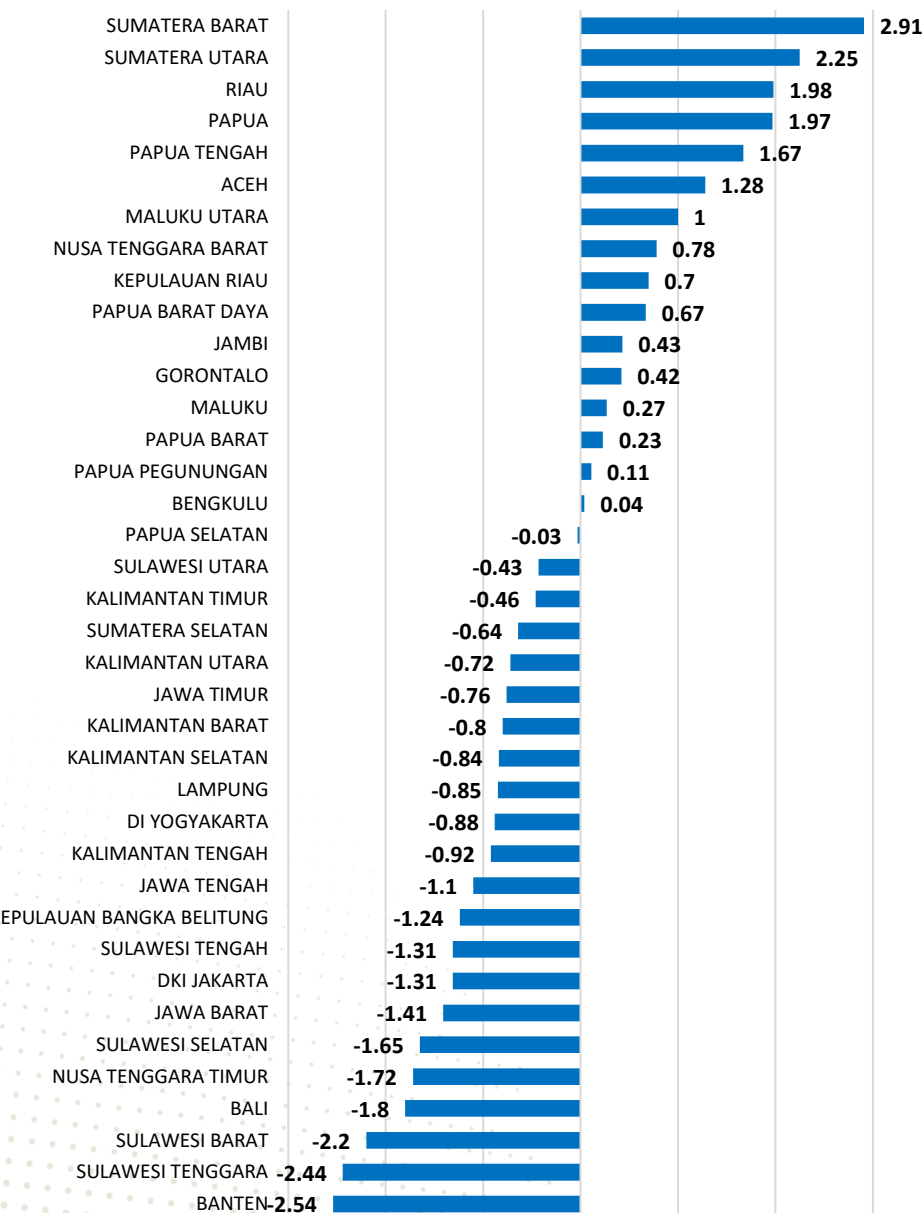


**\*) Catatan**  
Inflasi Kab/Kota merupakan sampel 150 IHK BPS



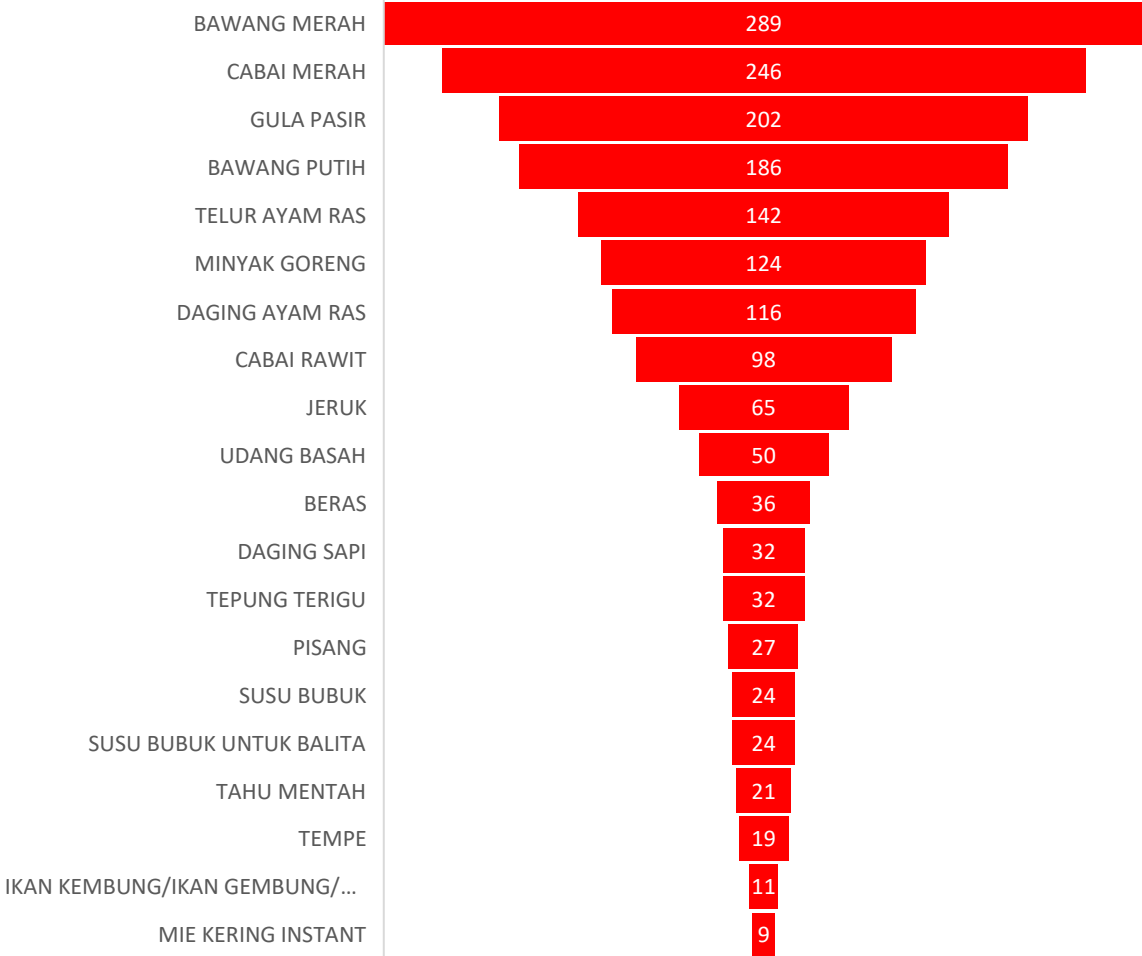


## PADA MINGGU V MEI TAHUN 2024



Lanjutan... **INDEKS PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN MINGGU V MEI TAHUN 2024**

INDIKATOR PERKEMBANGAN HARGA **MINGGU IV MEI**

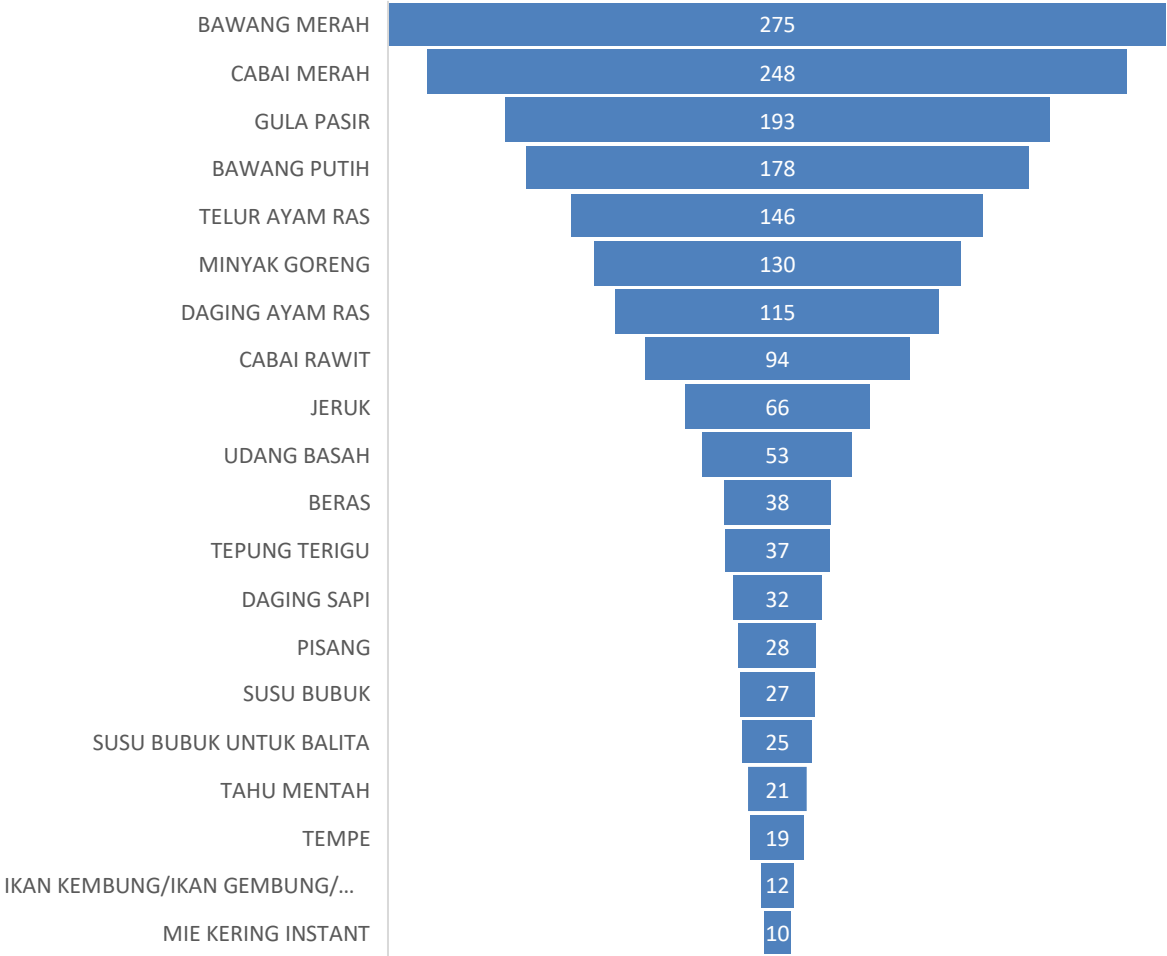


**Minggu IV Mei 2024**, komoditas yang mengalami kenaikan:

- a. Bawang Merah di 289 daerah kabupaten/kota
- b. Cabai Merah di 246 daerah kabupaten/kota
- c. Gula Pasir di 202 daerah kabupaten/kota

Sumber: Kemendagri, diolah 3 Juni 2024

INDIKATOR PERKEMBANGAN HARGA **MINGGU V MEI**



**Minggu V Mei 2024**, komoditas yang mengalami kenaikan:

- a. Bawang Merah di 275 daerah kabupaten/kota
- b. Cabai Merah di 248 daerah kabupaten/kota
- c. Gula Pasir di 193 daerah kabupaten/kota





## ATENSI 10 PEMDA YANG MENGALAMI KENAIKAN/ PENURUNAN HARGA MINGGU V MEI 2024

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)	KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (KENAIKAN)
KAB. LOMBOK BARAT	7.20	BAWANG MERAH, BERAS, DAGING AYAM RAS
KAB. ROKAN HULU	4.68	DAGING AYAM RAS, CABAI MERAH, UDANG BASAH
KAB. SOLOK SELATAN	4.21	CABAI MERAH, BERAS, BAWANG MERAH
KAB. PESISIR SELATAN	4.07	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, MIE KERING INSTANT
KAB. SOLOK	3.97	CABAI MERAH, DAGING SAPI, DAGING AYAM RAS
KAB. SAMOSIR	3.88	TELUR AYAM RAS, CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS
KAB. BIAK NUMFOR	3.81	CABAI RAWIT, BAWANG MERAH, CABAI MERAH
KAB. KEPULAUAN MENTAWAI	3.77	CABAI MERAH, BAWANG MERAH, BERAS
KAB. TAPANULI SELATAN	3.73	CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS, BAWANG MERAH
KAB. LABUHANBATU UTARA	3.54	DAGING SAPI, CABAI MERAH, DAGING AYAM RAS

KAB/KOTA	INDEKS PERKEMBANGAN HARGA (%)	KOMODITAS ANDIL PERUBAHAN HARGA (PENURUNAN)
KAB. MEMPAWAH	-6.57	BERAS, DAGING SAPI, TELUR AYAM RAS
KAB. SUMBAWA BARAT	-5.82	BERAS, CABAI RAWIT, CABAI MERAH
KAB. TORAJA UTARA	-5.68	BERAS, DAGING AYAM RAS, UDANG BASAH
KAB. MUNA	-4.80	BERAS, DAGING AYAM RAS, DAGING SAPI
KAB. PINRANG	-4.60	DAGING AYAM RAS, BERAS, CABAI MERAH
KAB. HULU SUNGAI UTARA	-4.40	DAGING AYAM RAS, BERAS, MIE KERING INSTANT
KAB. BOMBANA	-3.96	BERAS, DAGING AYAM RAS, UDANG BASAH
KAB. BANJARNEGARA	-3.88	BERAS, DAGING SAPI, DAGING AYAM RAS
KAB. INDRAMAYU	-3.84	BERAS, DAGING SAPI, DAGING AYAM RAS
KAB. BIMA	-3.79	BERAS, CABAI RAWIT, BAWANG MERAH



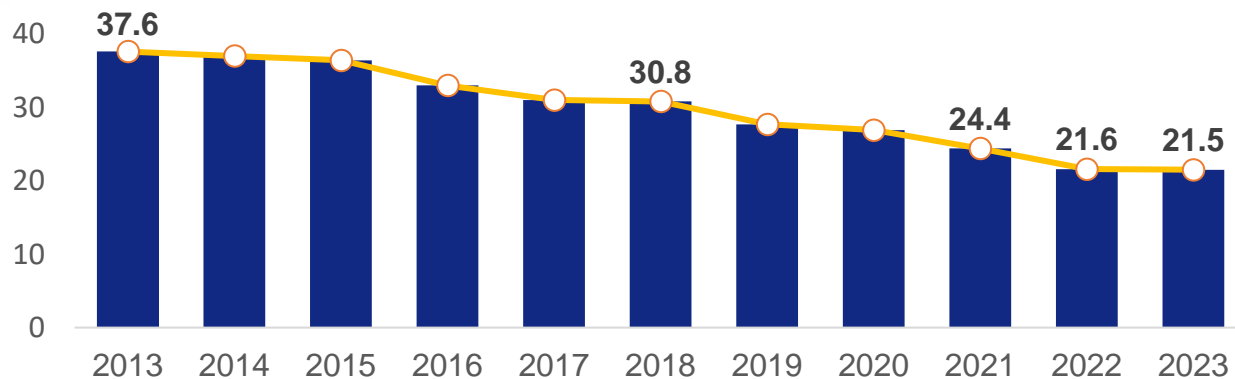
## B. PERCEPATAN PENURUNAN PREVALENSI STUNTING



21,5% Balita di Indonesia mengalami *stunting*

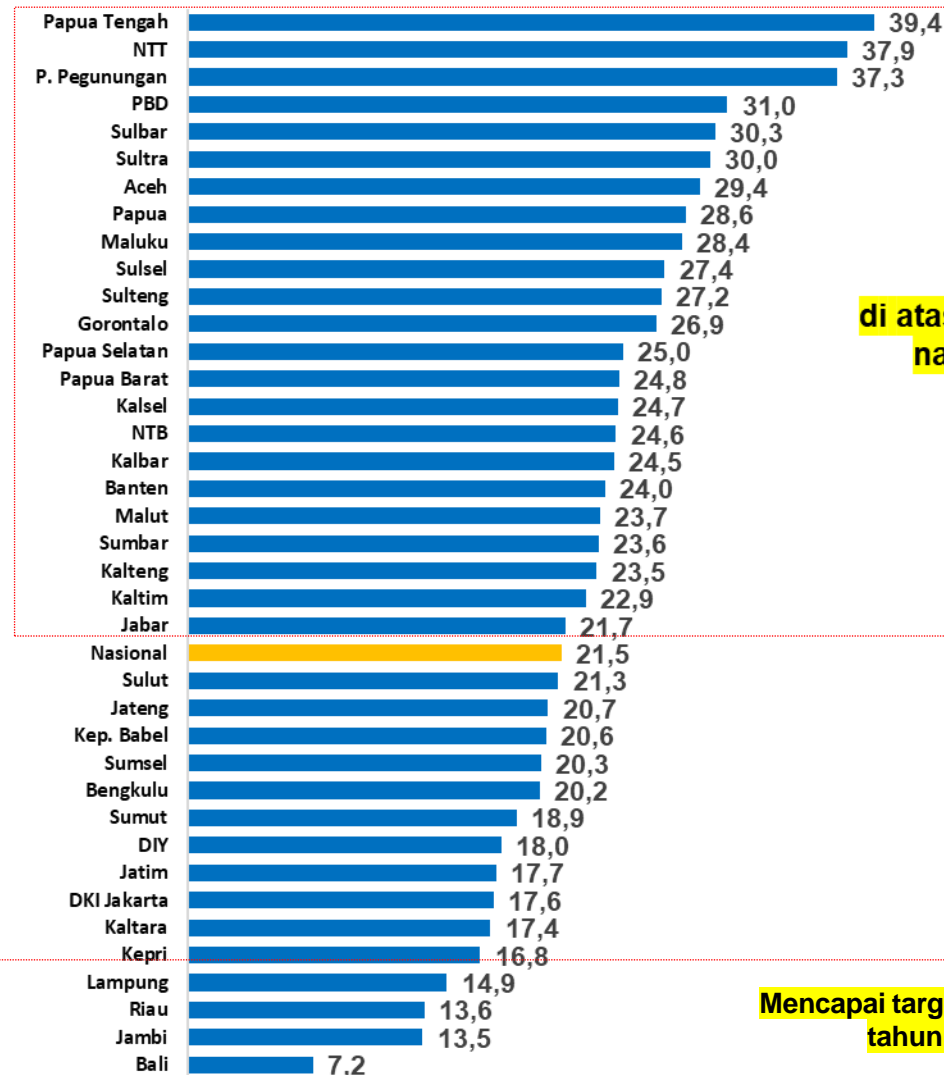
TARGET PENURUNAN STUNTING (%)

2019	2020	2021	2022	2023	2024
27,7%	24,1%	21,1%	18,4%	16%	14%



- Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 mencatat **angka prevalensi stunting nasional sebesar 21,5%** dan telah terjadi penurunan prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir (2013-2023).
- Namun, progress ini **belum memenuhi target RPJMN 2020-2024 yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14% pada tahun 2024.**
- Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak **15 provinsi memiliki prevalensi stunting di bawah angka nasional**. Tiga provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi adalah Papua Tengah (39,4%), Nusa Tenggara Timur (37,9%) dan Papua Pegunungan (37,3%).

Prevalensi Stunting per-provinsi Tahun 2023

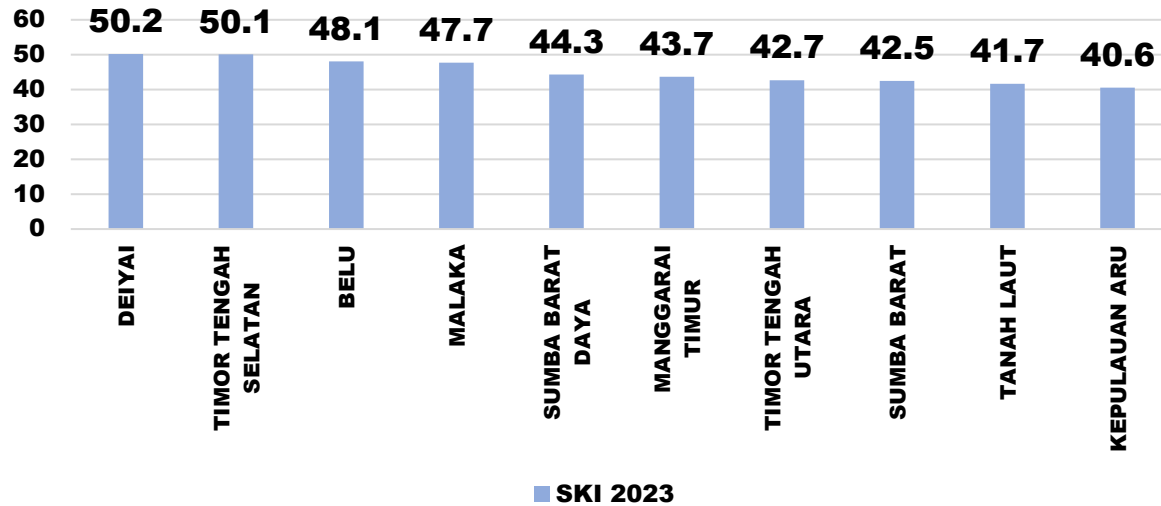


di atas rata-rata nasional

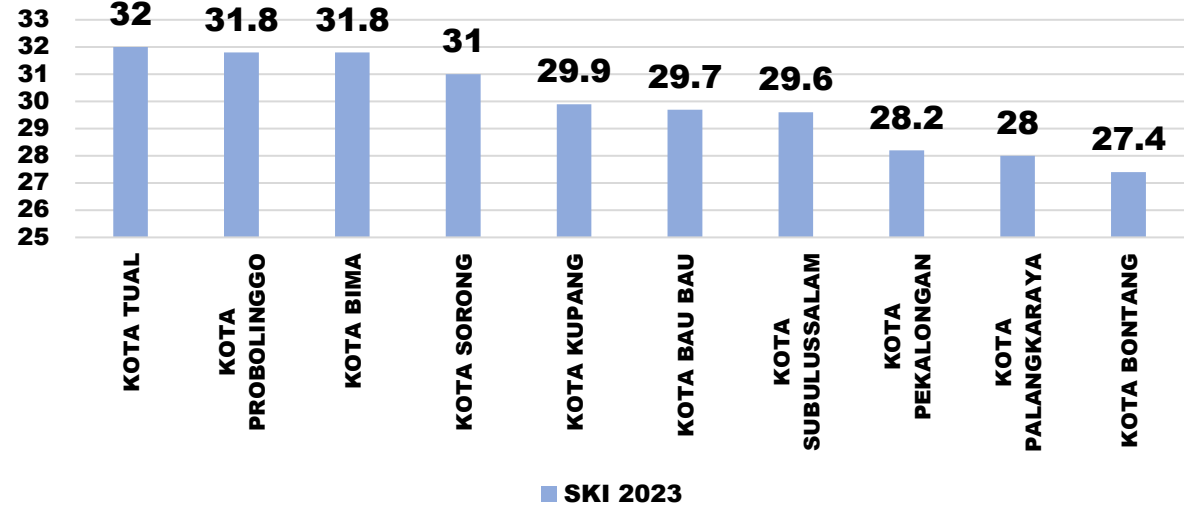
Mencapai target penurunan tahun 2023



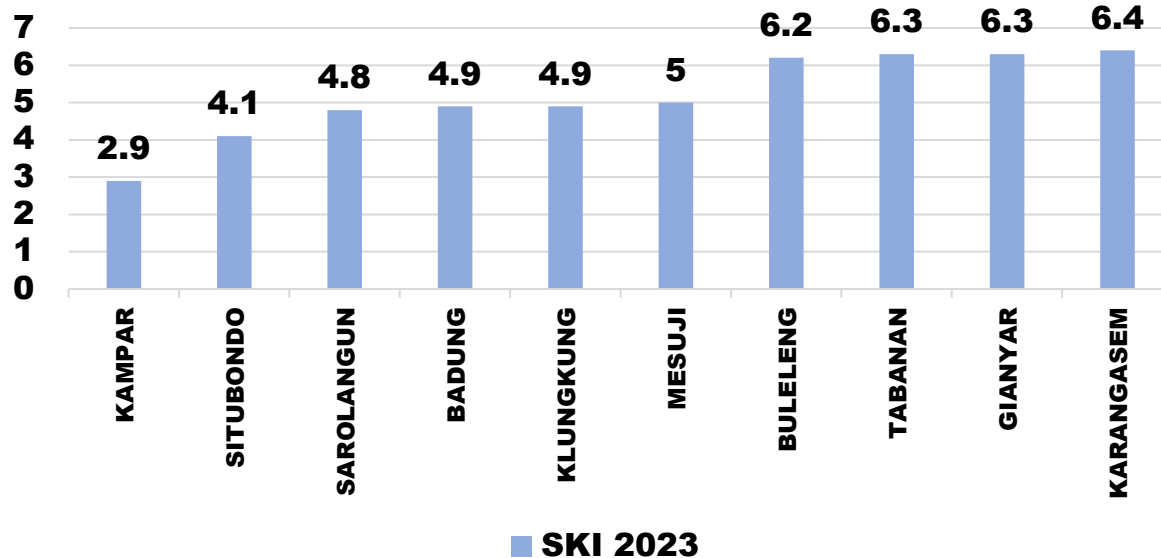
### 10 KABUPATEN PREVALENSI TERTINGGI



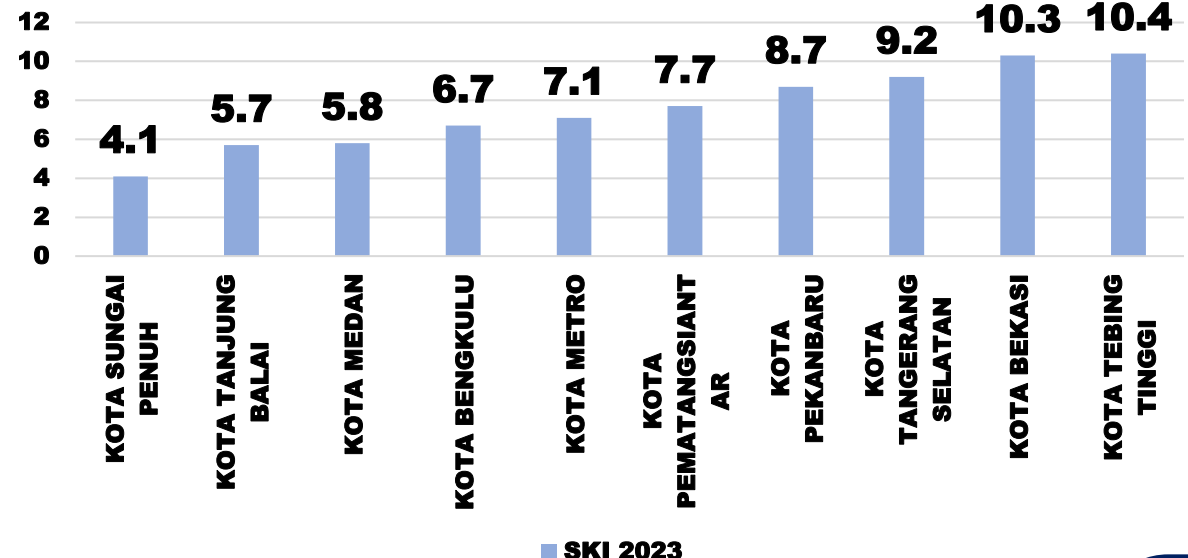
### 10 KOTA PREVALENSI TERTINGGI



### 10 KABUPATEN PREVALENSI TERENDAH

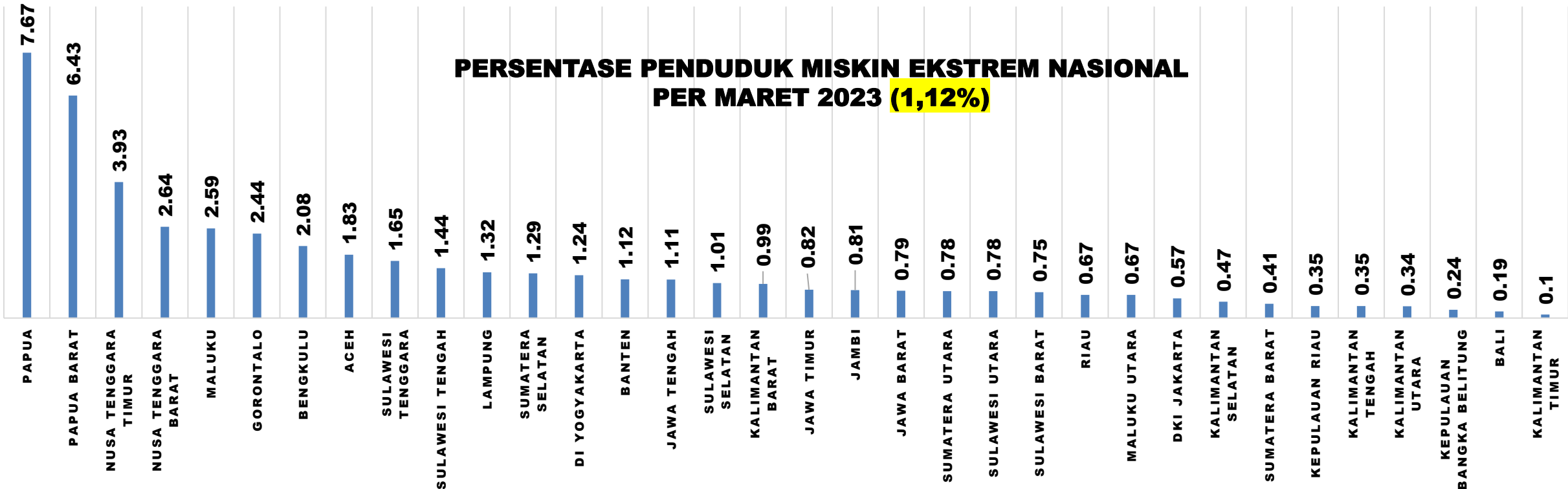


### 10 KOTA PREVALENSI TERENDAH





## C. PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM



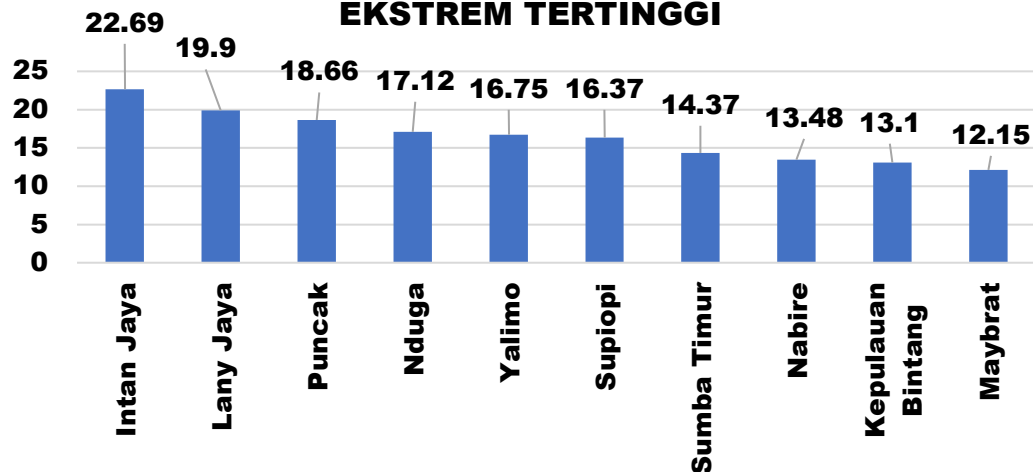
1. Lakukan **pengecekan** penduduk miskin ekstrem dengan **pendataan detail by name by address**, data berasal dari **bottom up** (dari desa ke Kab/Kota → Provinsi).
2. **Pelajari penyebab kemiskinan ekstrem** yang terjadi di daerahnya dan lakukan tindakan **intervensi**, misalnya karena kurangnya sarana air bersih, sarana jalan rusak dll.
3. Lakukan **koordinasi dengan Kab/Kota (Doing Sharing)**, apakah bisa dikerjakan bersama atau bisa oleh Kab/Kota sendiri.
4. Berikan **reward dan punishment** bagi daerah Kab/Kota dalam melakukan pengentasan kemiskinan ekstrem (Kompetitif)

\*Data belum termasuk 4 DOB Papua

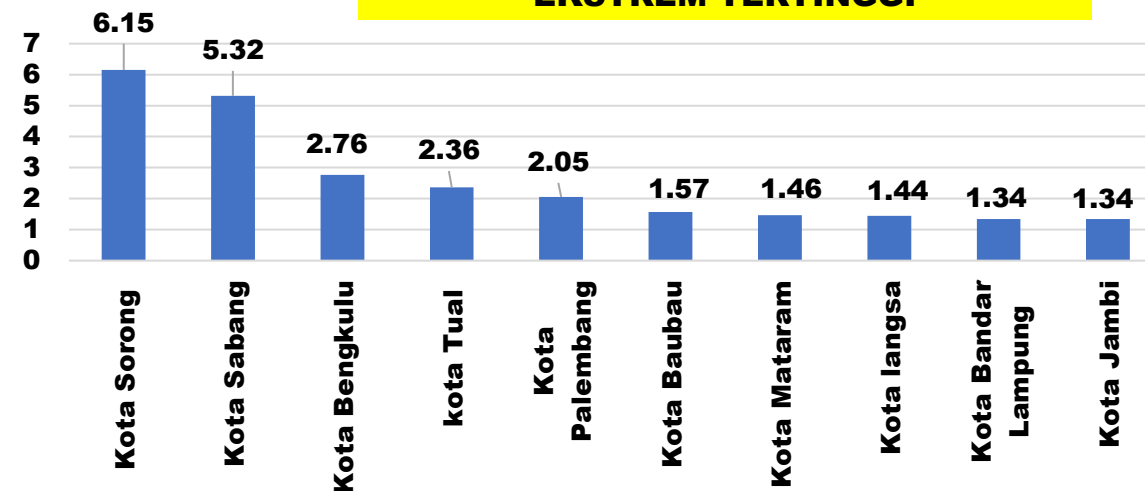




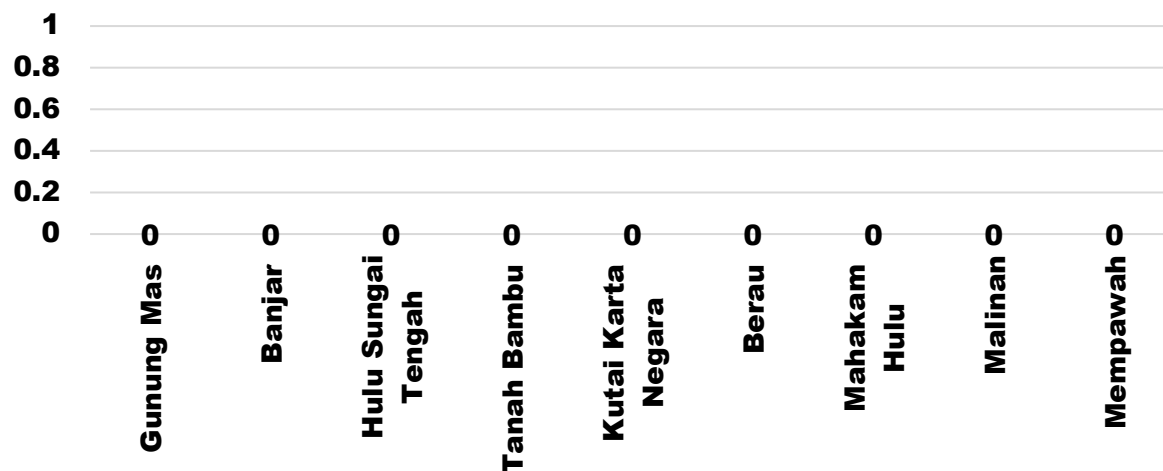
**ESTIMASI 10 KABUPATEN ANGKA KEMISKINAN  
EKSTREM TERTINGGI**



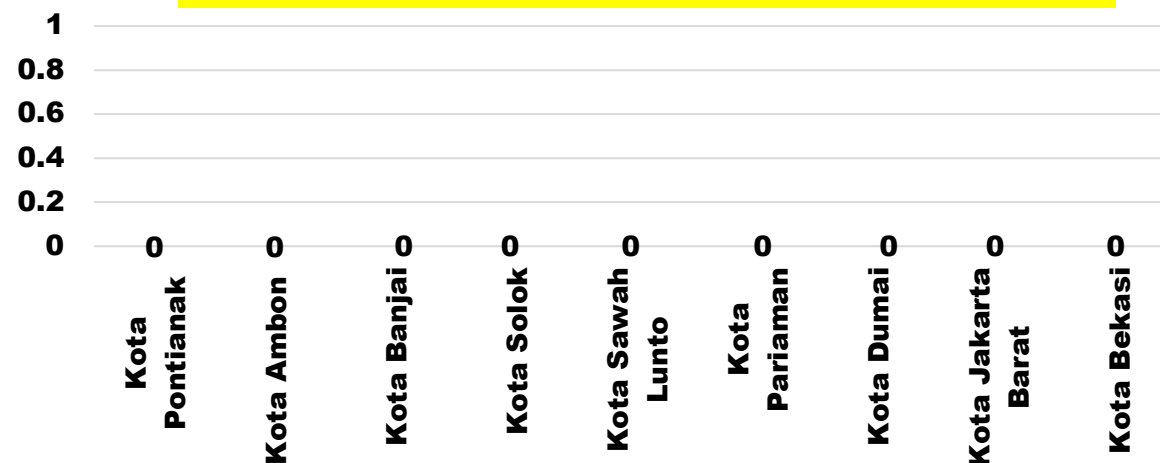
**ESTIMASI 10 KOTA ANGKA KEMISKINAN  
EKSTREM TERTINGGI**



**ESTIMASI 10 KABUPATEN ANGKA KEMISKINAN  
EKSTREM TERENDAH**



**ESTIMASI 10 KOTA ANGKA KEMISKINAN EKSTEM  
TERENDAH**



Catatan: Terdapat 37 Kabupaten dan 24 Kota di Indonesia yang memiliki nilai persentase kemiskinan ekstrem 0%.

**MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)****Jumlah dan Sebaran MPP di Daerah****Pulau Sumatera:****33**

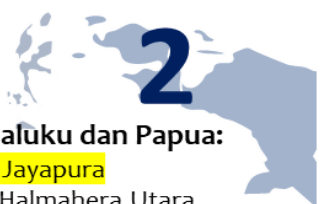
1. Kota Batam
2. Kota Padang
3. Kota Pekanbaru
4. Kota Banda Aceh
5. Kota Payakumbuh
6. Kab. Tulang Bawang
7. Kota Palembang
8. Kota Tebing Tinggi
9. Kota Jambi
10. Kota Pariaman
11. Kota Bukittinggi
12. Kota Sawahlunto
13. Kota Tanjung Pinang
14. Kab. Tanjung Jabung Barat
15. Kota Metro
16. Kab. Lampung Tengah
17. Kota Bengkulu
18. Kab. Bengkulu Tengah
19. Kab. Lebong
20. Kab. Lampung Selatan
21. Kab. Lampung Utara
22. Kota Dumai
23. Kab. Asahan
24. Kab. Aceh Besar
25. Kab. Humbang Hasundutan
26. Kab. Musi Rawas
27. Kab. Tebo
28. Kab. Bengkulu Utara
29. Kab. Aceh Tengah
30. Kab. Tulang Bawang Barat
31. Kab. Muara Enim
32. Kab. Lubuk Linggau
33. Kab. Bengkalis

**Pulau Kalimantan****21**

1. Kab. Tabalong
2. Kota Samarinda
3. Kota Banjarbaru
4. Kota Singkawang
5. Kab. Sanggau
6. Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Kab. Barito Kuala
8. Kab. Banjar
9. Kab. Bulungan
10. Kota Tarakan
11. Kota Balikpapan
12. Kota Bontang
13. Kab. Kutai Kartanegara
14. Kab. Kubu Raya
15. Kab. Tapin
16. Kab. Hulu Sungai Utara
17. Kab. Kotawaringin Timur
18. Kab. Ketapang
19. Kab. Sekadau
20. Kota Palangkaraya
21. Kabupaten Sintang

**Pulau Maluku dan Papua:**

1. Kota Jayapura
2. Kab. Halmahera Utara

**Pulau Sulawesi:****25**

1. Kota Tomohon
2. Kota Palu
3. Kota Palopo
4. Kab. Barru
5. Kab. Bone Bolango
6. Kab. Bombana
7. Kab. Kep. Selayar
8. Kab. Bantaeng
9. Kab. Maros
10. Kab. Pinrang
11. Kota Parepare
12. Kota Manado
13. Kota Kendari
14. Kab. Pangkep
15. Kab. Soppeng
16. Kab. Wajo
17. Kab. Poso
18. Kab. Konawe
19. Kab. Bolaang Mongondow Selatan
20. Kab. Sinjai
21. Kab. Toraja Utara
22. Kab. Morowali
23. Kab. Bone
24. Kab. Banggai
25. Kab. Polewali Mandar

**Pulau Bali dan Nusa Tenggara:****11**

1. Kota Denpasar
2. Kab. Karangasem
3. Kab. Badung
4. Kab. Belu
5. Kab. Lombok Tengah
6. Kota Mataram
7. Kabupaten Klungkung
8. Kab. Buleleng
9. Kab. Manggarai Timur
10. Kota Kupang
11. Kab. Ngada

**175** MPP TELAH DIRESMIKAN**51** KOTA TELAH MEMILIKI MPP**Pulau Jawa:****83**

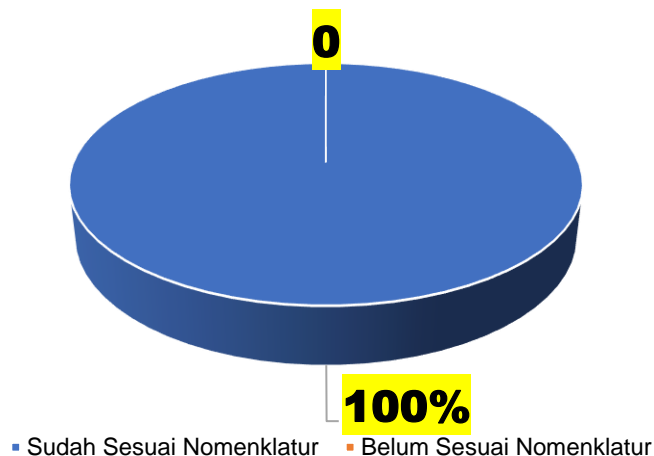
1. Prov. DKI Jakarta
2. Kota Surabaya
3. Kab. Banyuwangi
4. Kab. Probolinggo
5. Kab. Kulon Progo
6. Kab. Banyumas
7. Kab. Sidoarjo
8. Kab. Sleman
9. Kota Bogor
10. Kab. Sumedang
11. Kab. Ciamis
12. Kab. Batang
13. Kota Surakarta
14. Kab. Pandeglang
15. Kab. Jepara
16. Kab. Purwakarta
17. Kab. Pati
18. Kab. Lamongan
19. Kota Bekasi
20. Kota Salatiga
21. Kab. Magetan
22. Kab. Bojonegoro
23. Kab. Gresik
24. Kota Tangsel
25. Kab. Kendal
26. Kab. Blora
27. Kab. Karawang
28. Kab. Bekasi
29. Kab. Madiun
30. Kab. Bandung
31. Kab. Tuban
32. Kab. Karanganyar
33. Kota Magelang
34. Kota Mojokerto
35. Kota Bandung
36. Kab. Sukoharjo
37. Kota Yogyakarta
38. Kab. Purworejo
39. Kota Tasikmalaya
40. Kab. Kuningan
41. Kab. Pasuruan
42. Kota Cimahi
43. Kab. Sumenep
44. Kota Malang
45. Kab. Lumajang
46. Kab. Nganjuk
47. Kab. Cilacap
48. Kota Batu
49. Kota Semarang
50. Kab. Gunung Kidul
51. Kab. Brebes
52. Kab. Rembang
53. Kab. Grobogan
54. Kab. Boyolali
55. Kab. Klaten
56. Kab. Kudus
57. Kota Serang
58. Kota Cilegon
59. Kab. Sragen
60. Kab. Demak
61. Kab. Pekalongan
62. Kab. Pemalang
63. Kab. Purbalingga
64. Kab. Semarang
65. Kab. Wonogiri
66. Kota Tangerang
67. Kab. Bandung Barat
68. Kab. Cirebon
69. Kab. Pangandaran
70. Kab. Tegal
71. Kab. Tulungagung
72. Kab. Malang
73. Kab. Pacitan
74. Kab. Sampang
75. Kota Pasuruan
76. Kab. Bantul
77. Kota Kediri
78. Kab. Lebak
79. Kabupaten Tangerang
80. Kab. Magelang
81. Kab. Bangkalan
82. Kab. Jember
83. Kab. Pamekasan



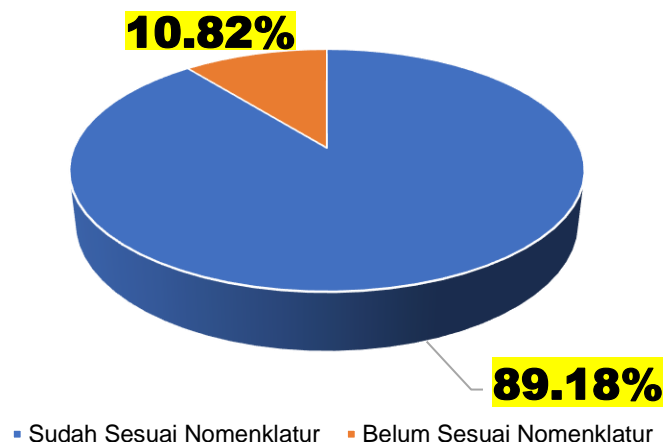
## DATA KELEMBAGAAN PTSP DI DAERAH

Daerah	Telah membentuk dan sudah sesuai nomenklatur	Belum Sesuai Nomenklatur	Total	Keterangan
Provinsi	38	0	38	-
Kabupaten	371	45	416	45 Kabupaten masih belum sesuai dengan regulasi; 10 Kabupaten belum melaporkan Perda Pembentukan Perangkat Daerah.
Kota	85	13	98	13 Kota masih belum sesuai dengan nomenklatur.

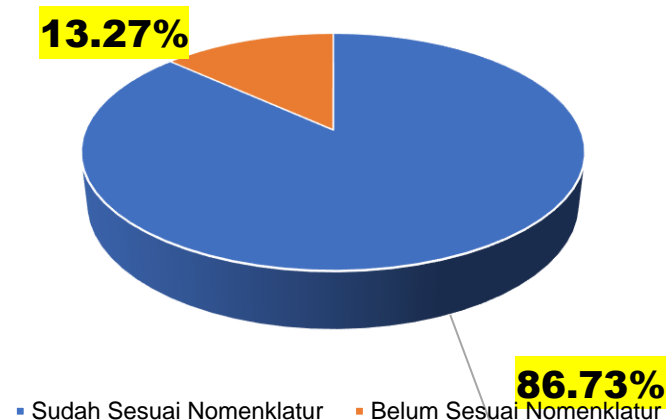
Kelembagaan yang sudah dan belum sesuai Nomenklatur 38 Provinsi



Kelembagaan yang sudah dan belum sesuai Nomenklatur 416 Kabupaten



Kelembagaan yang sudah dan belum sesuai Nomenklatur 98 Kota





## E. INDIKATOR ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, INFRASTRUKTUR DAN KAPASITAS SDM (STÁNDAR PELAYANAN MINIMUM)

### KEWAJIBAN DAERAH DALAM ALOKASI ANGGARAN

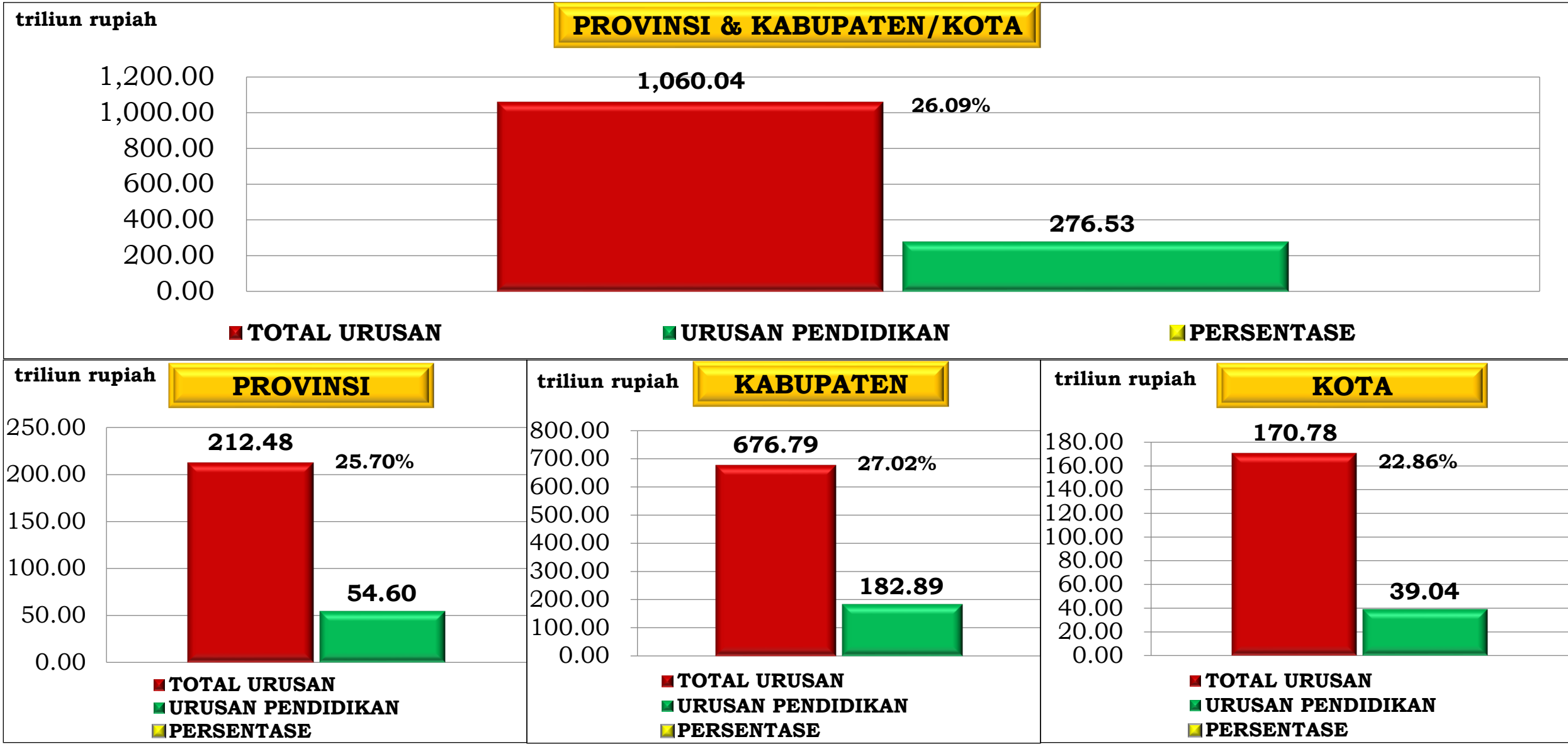


TIDAK HANYA **SENT**, TAPI **DELIVERED**



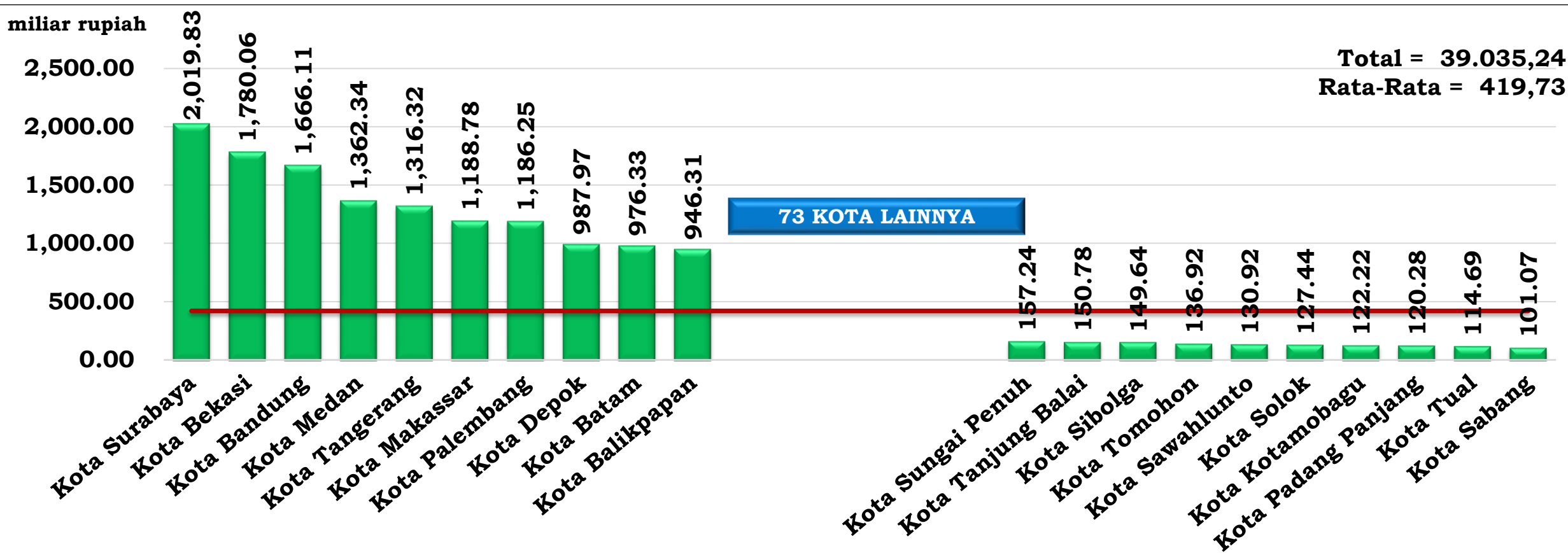


# APBD URUSAN PENDIDIKAN





## APBD URUSAN PENDIDIKAN KOTA



10 KOTA TERBESAR  
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN

10 KOTA TERKECIL  
ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN



## F. TATA RUANG PADA WILAYAH PERKOTAAN WALIKOTA AGAR:

1



Perlu ada **taman-taman di perkotaan**

2



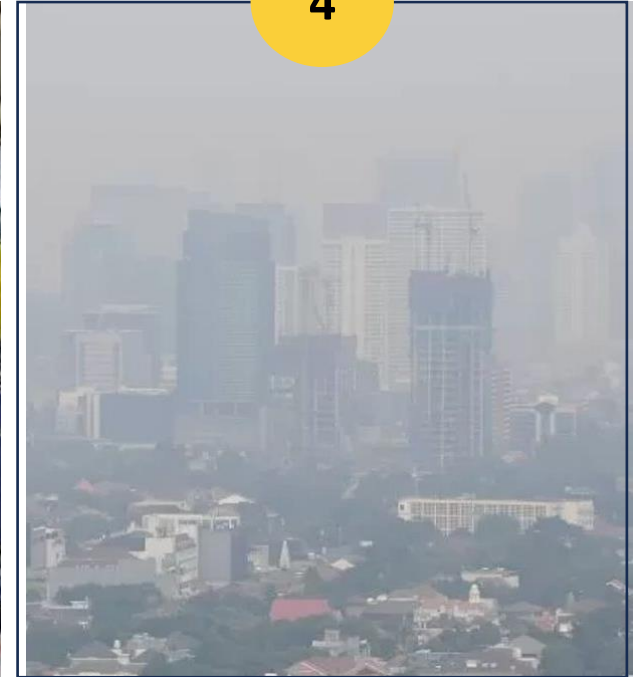
Sediakan **ruang terbuka hijau** → anggaran untuk membuat ruang terbuka hijau akan lebih kecil dari pada subsidi untuk kesehatan

3



**Trotoar** dibuat untuk pejalan kaki → **jangan digunakan untuk berdagang** atau berjualan

4

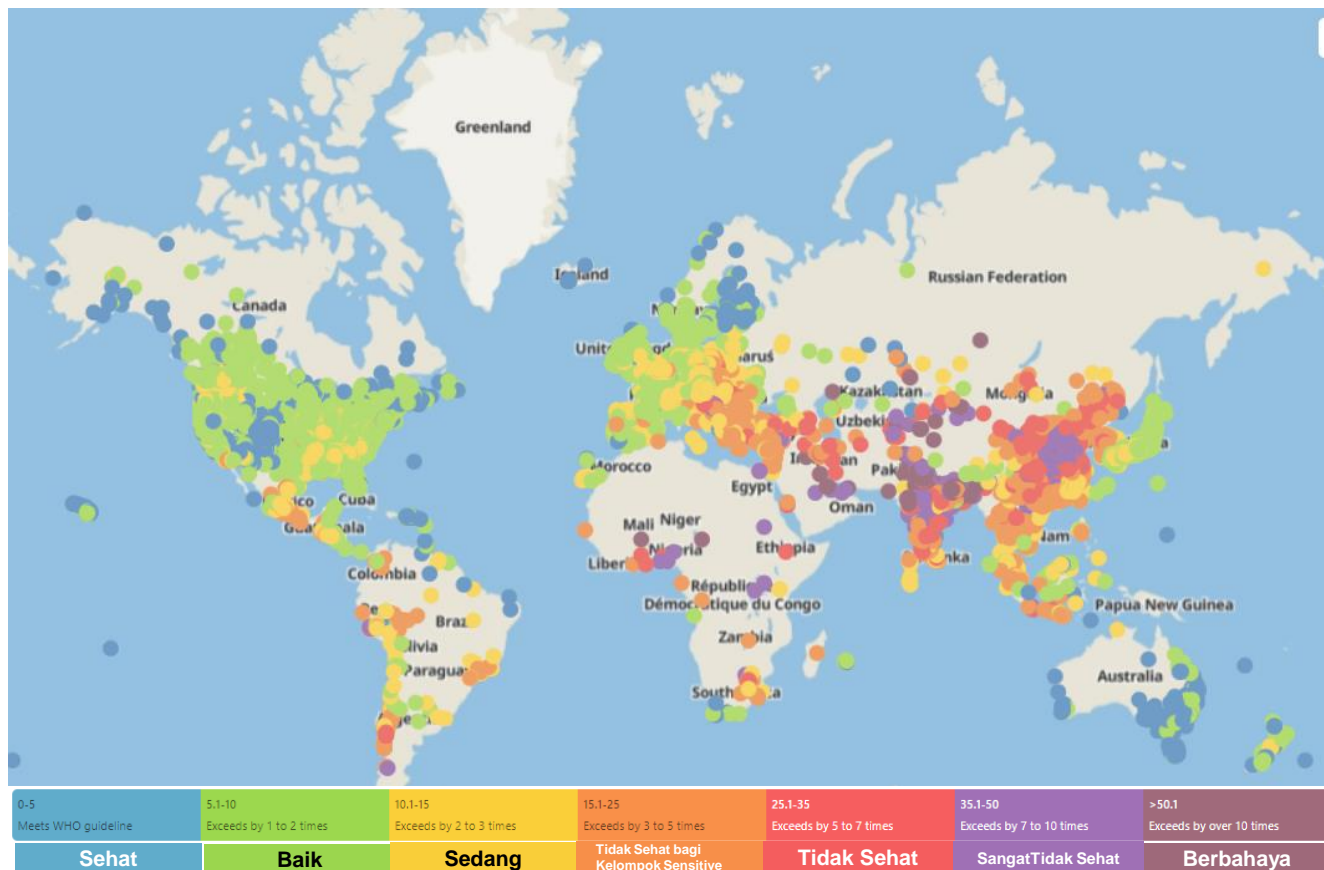


**Tingkatkan air quality** ke arah yang lebih baik





## STATISTIK *AIR QUALITY* INDEKS INDONESIA DAN DUNIA TAHUN 2023



Keterangan:

- berdasarkan konsentrasi PM<sub>2.5</sub> rata-rata tahunan ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )
- Particulate Matter (PM<sub>2.5</sub>) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari atau sama dengan 2.5  $\mu\text{m}$  (mikrometer).

### Peringkat Kualitas Udara Negara di Dunia

No	Negara	Skor
1	Bangladesh	79,9
2	Pakistan	73,7
3	India	54,4
4	Tajikistan	49
5	Burkina Faso	46,6
6	Iraq	43,8
7	United Arab Emirates	43
8	Nepal	42,4
9	Egypt	42,4
10	Congo	40,8

Negara dengan  
kualitas udara  
**terburuk**

3 Negara lainnya

14	Indonesia	37,1
----	-----------	------

114 Negara lainnya

Negara dengan  
kualitas udara  
**terbaik**

129	New Zealand	4,3
130	Bermuda	4,1
131	Grenada	4,1
132	Iceland	4
133	Mauritius	3,5
134	French Polynesia	3,2

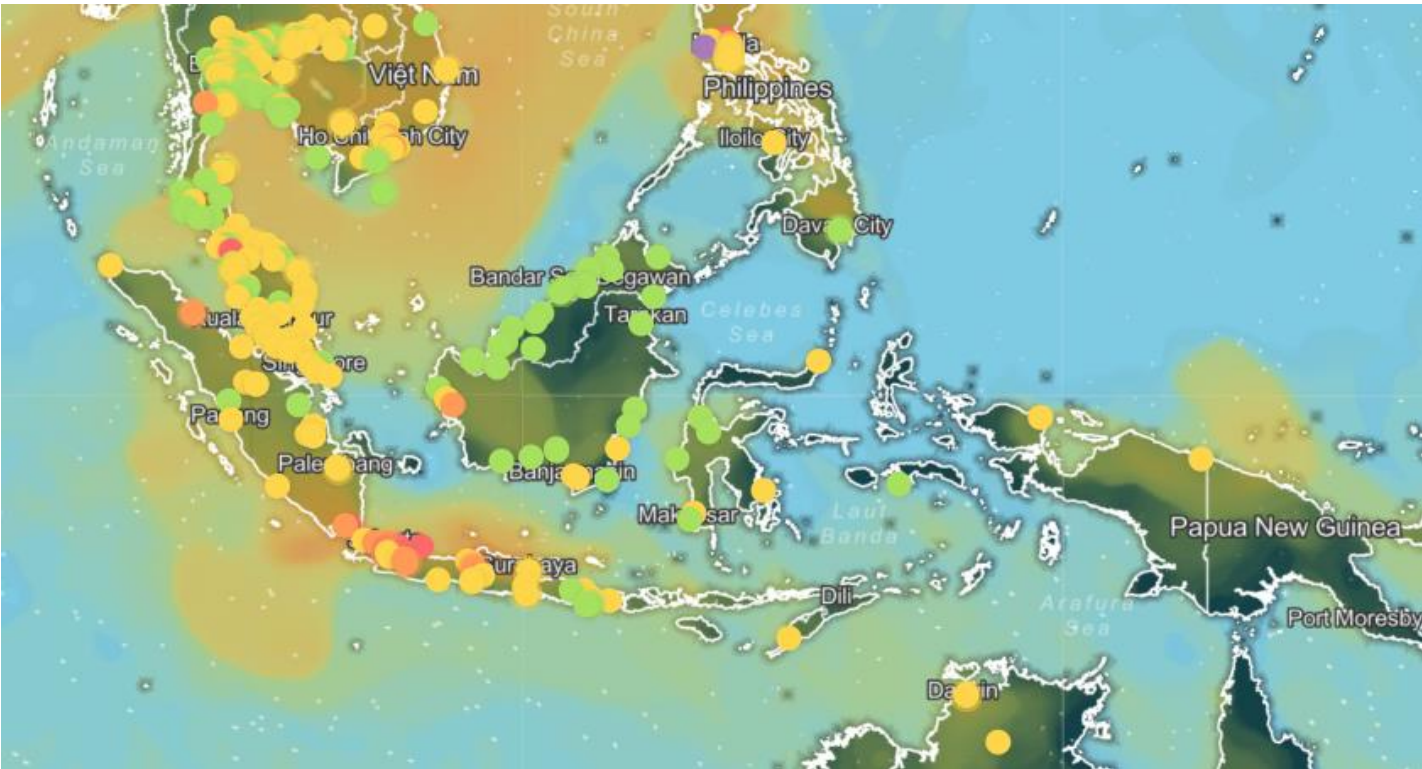




## AIR QUALITY INDEKS PERKOTAAN DI INDONESIA TAHUN 2023

*Real time* Kota besar dengan  
polusi terburuk di Indonesia

No	Negara	Skor
1	Tangerang Selatan	167
2	Bandung	151
3	Surabaya	100
4	Jakarta	91
5	Palembang	69
6	Pekanbaru	69
7	Denpasar	63
8	Bogor	56
9	Jambi	55
10	Malang	53



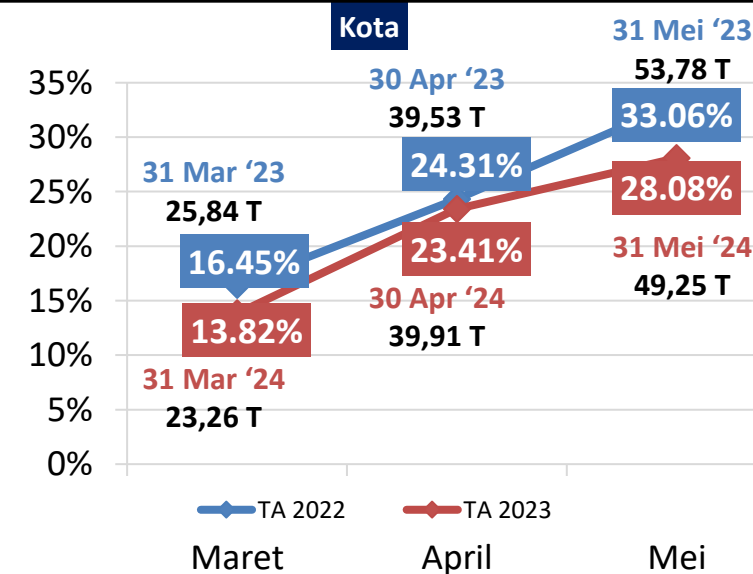
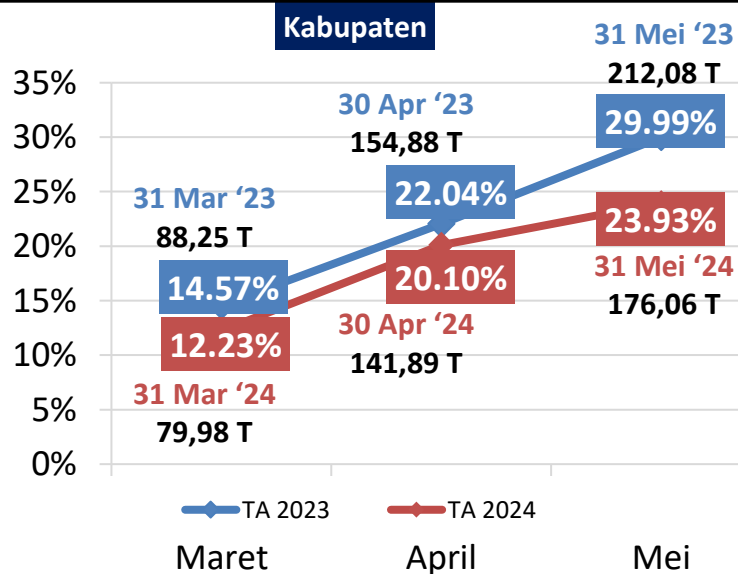
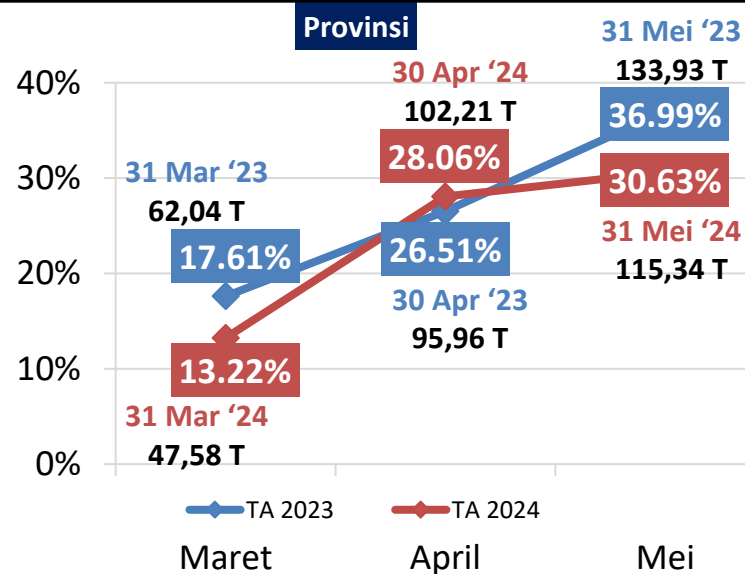
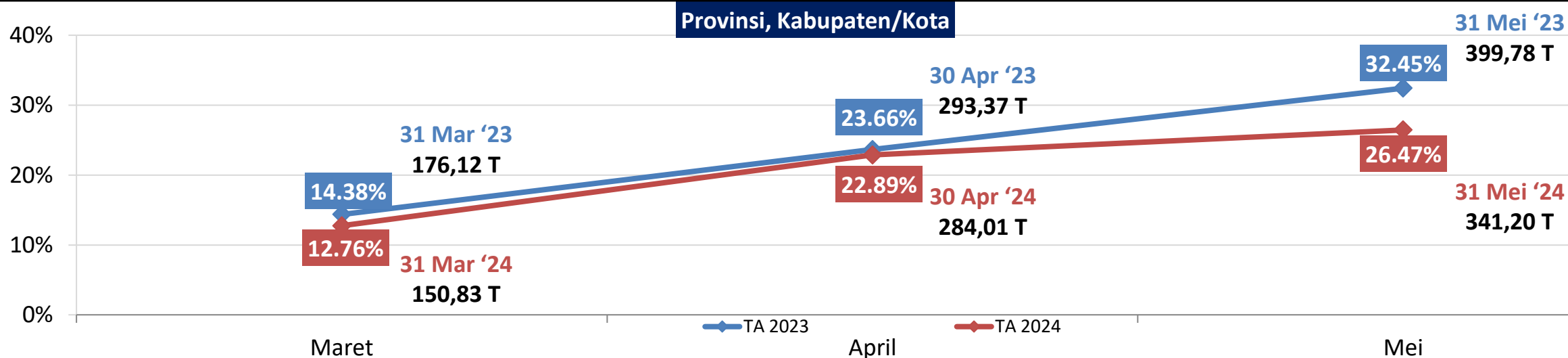
0-5 Meets WHO guideline	5.1-10 Exceeds by 1 to 2 times	10.1-15 Exceeds by 2 to 3 times	15.1-25 Exceeds by 3 to 5 times	25.1-35 Exceeds by 5 to 7 times	35.1-50 Exceeds by 7 to 10 times	>50.1 Exceeds by over 10 times
Sehat	Baik	Sedang	Tidak Sehat bagi Kelompok Sensitive	Tidak Sehat	Sangat Tidak Sehat	Berbahaya

2023 Indonesia cleanest city	Mamuju , West Sulawesi	20
2023 Indonesia most polluted city	South Tangerang , Banten	162



## G. REALISASI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

TREN PERSENTASE **REALISASI PENDAPATAN** APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2023-2024

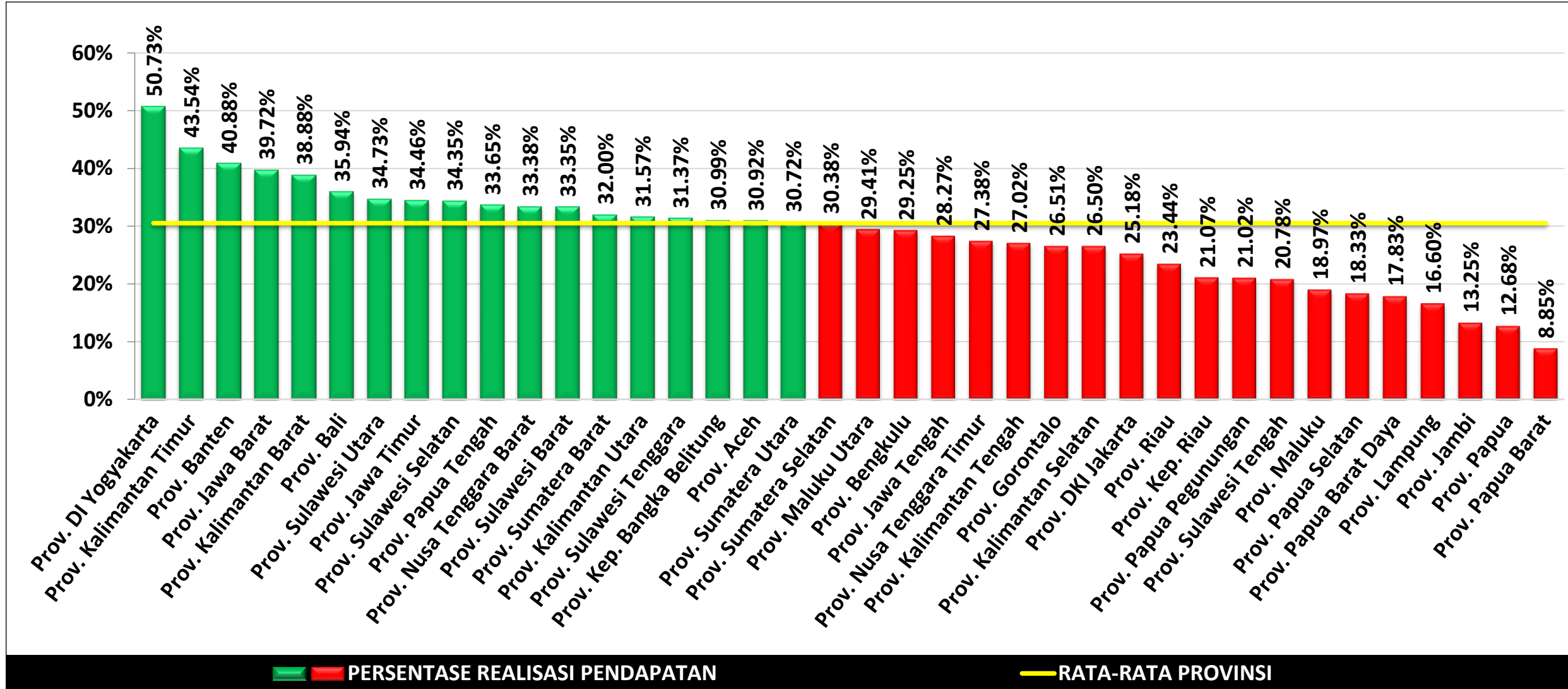




# PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2024



Rata-Rata Provinsi = 30,63%

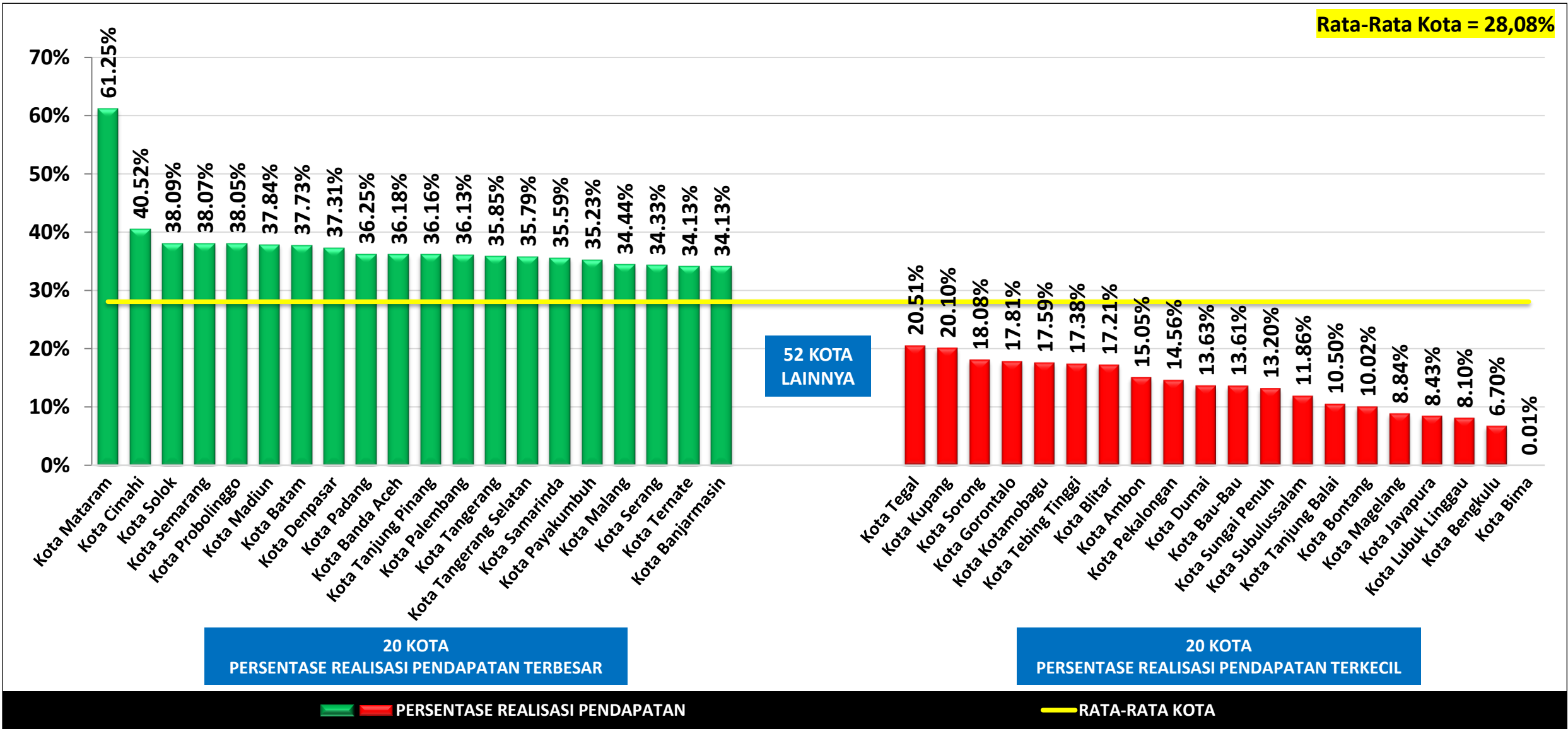


PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN

RATA-RATA PROVINSI



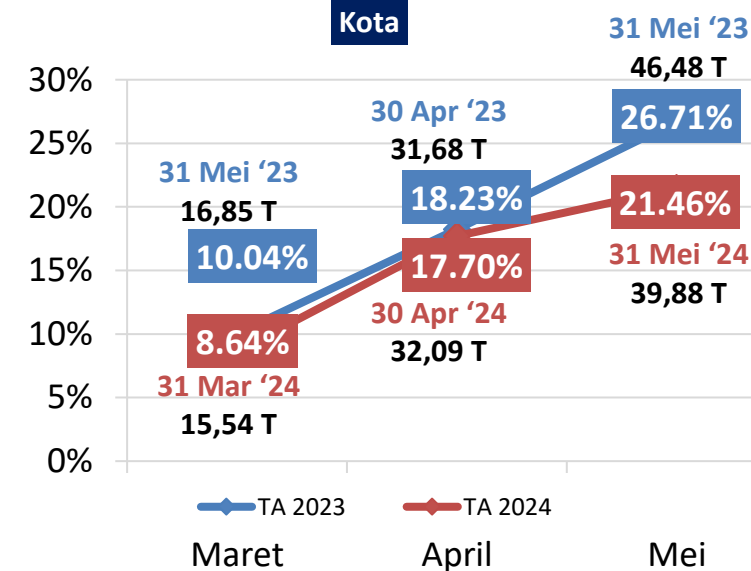
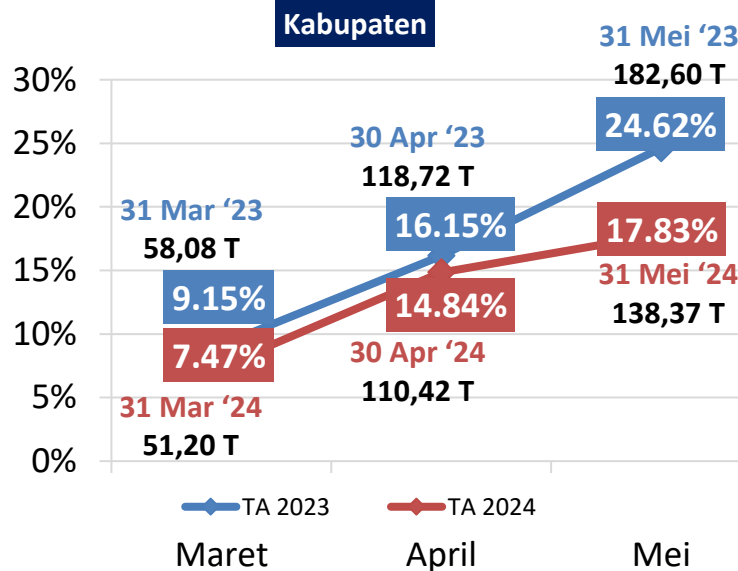
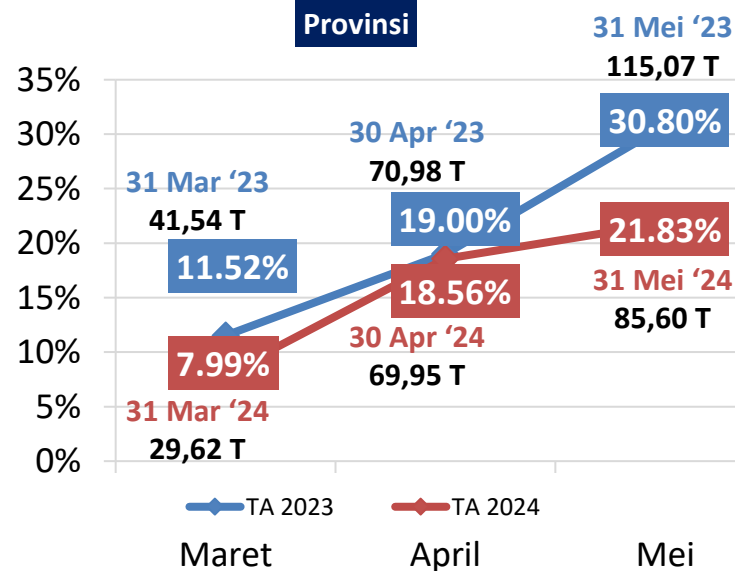
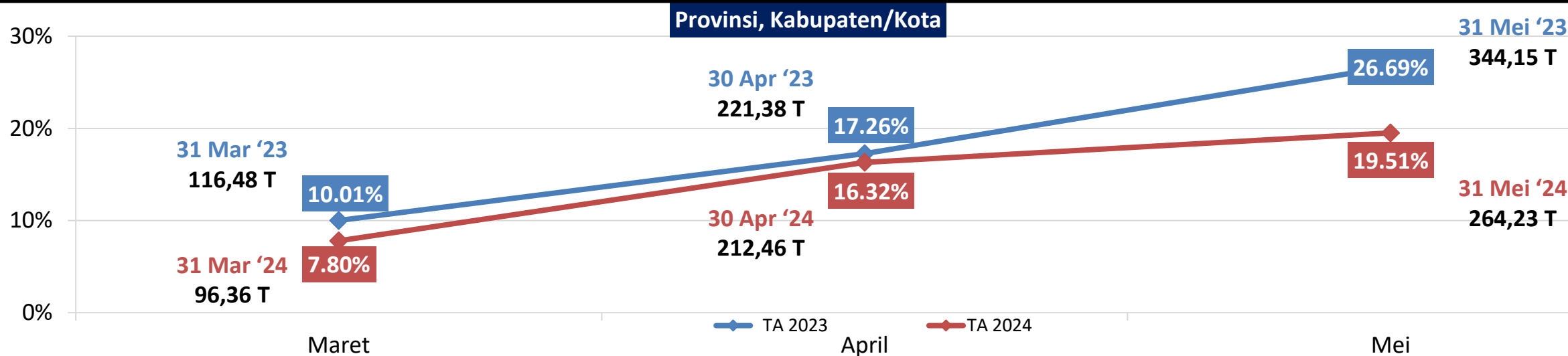
# PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2024



Sumber Data : Laporan 92 Pemkot untuk LRA per 1 Januari s.d. 31 Mei 2024, pukul 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024



## TREN PERSENTASE **REALISASI BELANJA** APBD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA TA 2023-2024

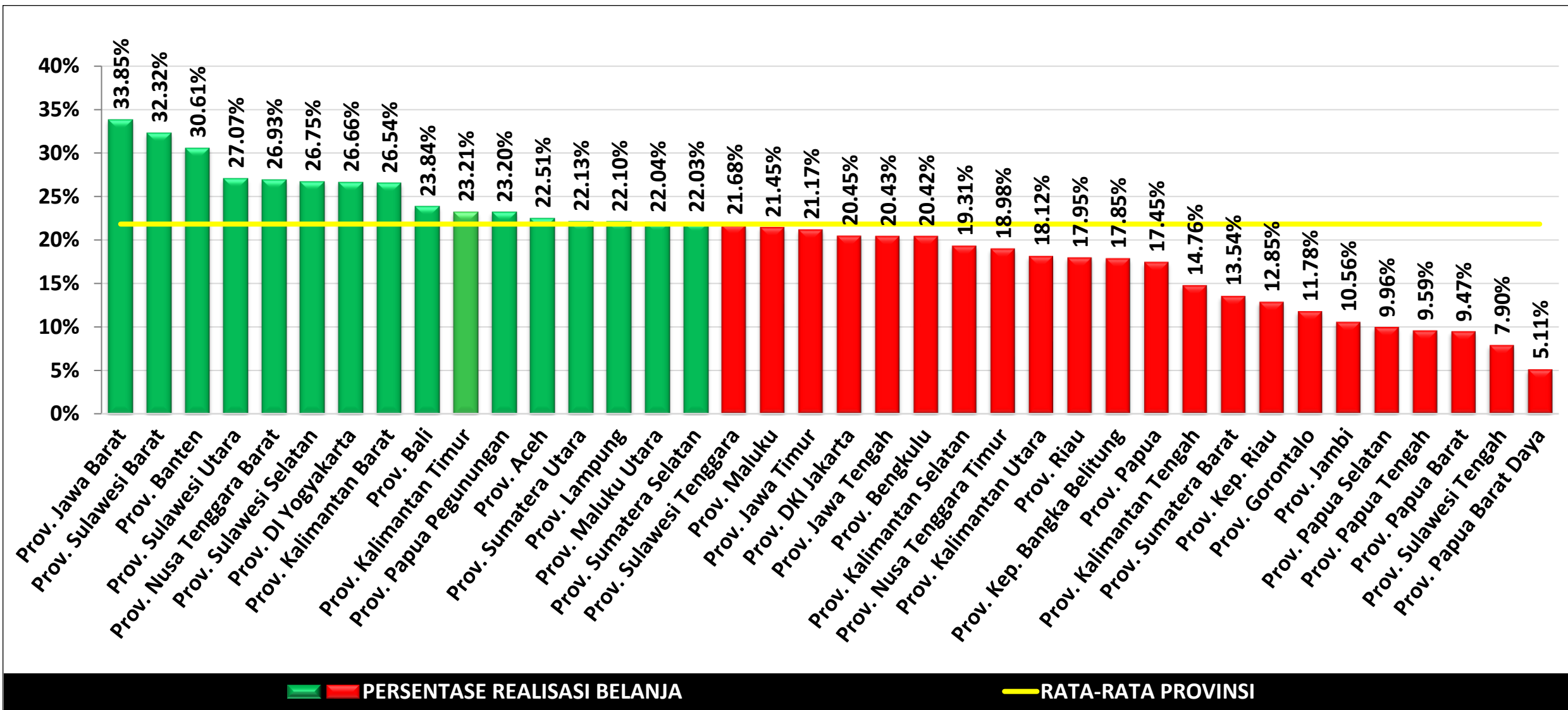






## PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD PROVINSI SE-INDONESIA TA 2024

Rata-Rata Provinsi = 21,83%



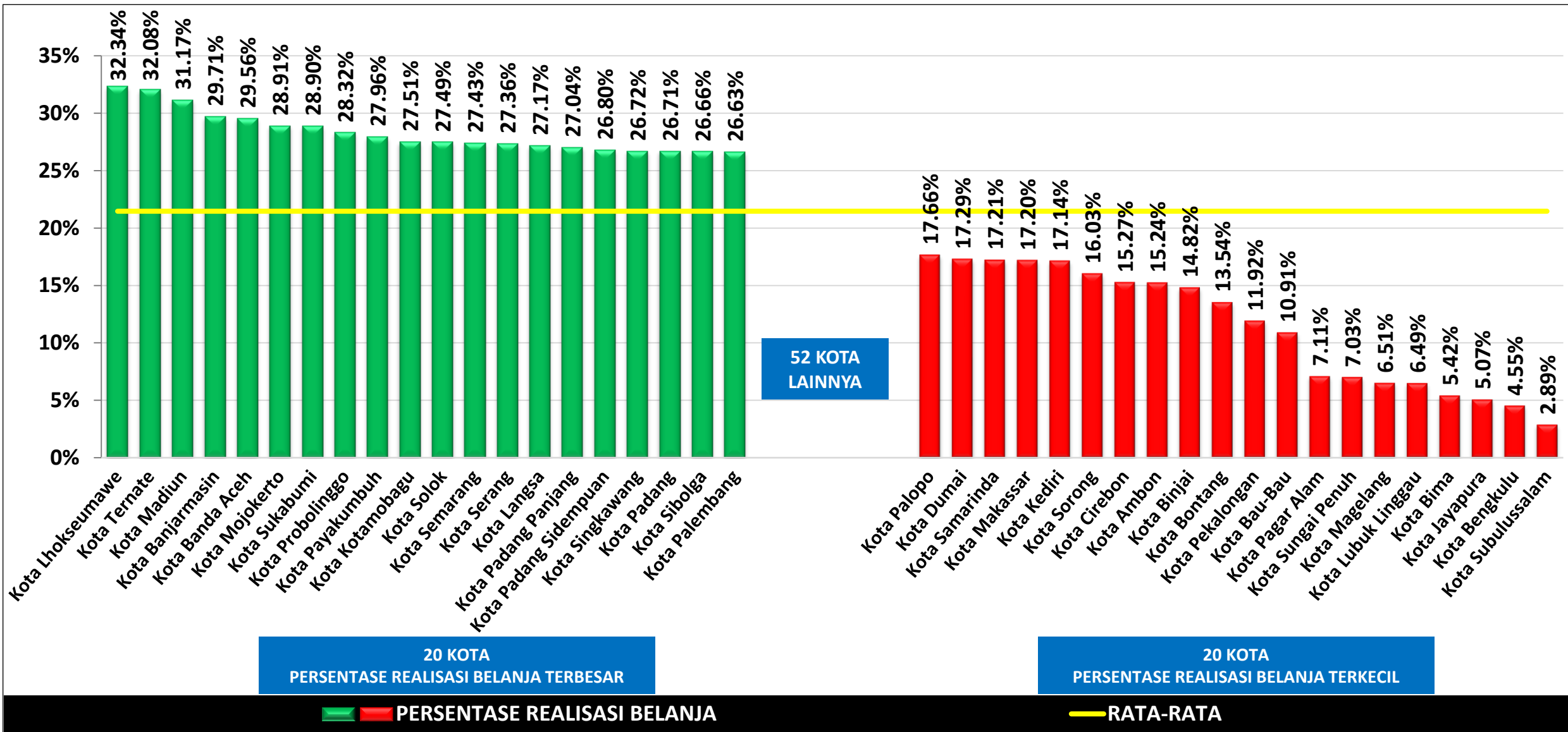


Lanjutan...



## PERSENTASE REALISASI BELANJA APBD KOTA SE-INDONESIA TA 2024

Rata-Rata Kota = 21,46%



Sumber Data : Laporan 92 Pemkot untuk LRA per 1 Januari s.d. 31 Mei 2024, pukul 18.00 WIB (Data Diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024



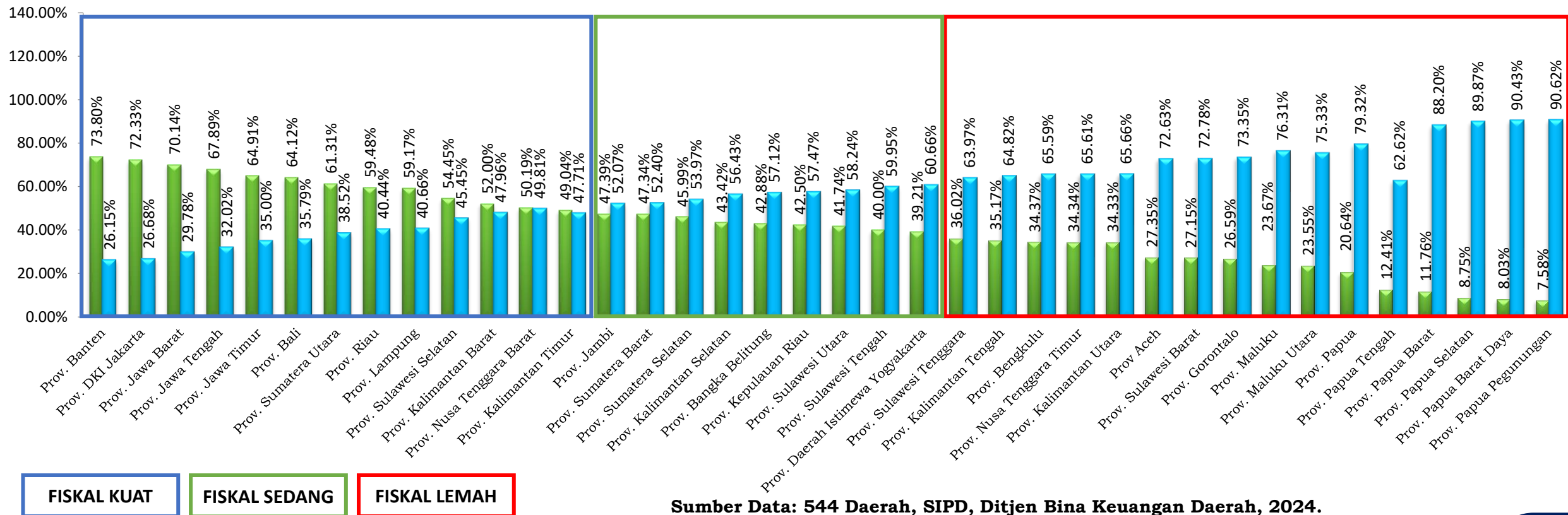
# KAPASITAS FISKAL DAERAH

## APBD PROVINSI TA 2024



Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu:

- Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat.
- Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).



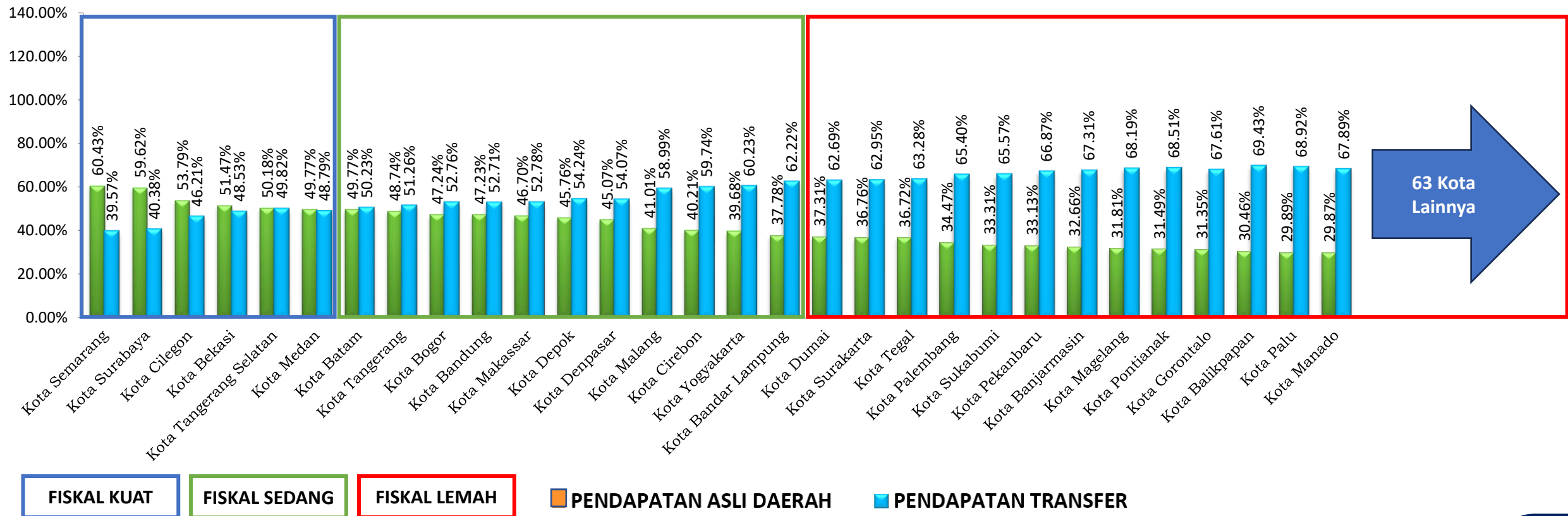
Sumber Data: 544 Daerah, SIPD, Ditjen Bina Keuangan Daerah, 2024.



## APBD KOTA TA 2024

Kemendagri membagi kategori daerah berdasarkan kapasitas keuangan fiskal yaitu:

- Kapasitas **Fiskal Kuat** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari pendapatan transfer pusat.
- Kapasitas **Fiskal Sedang** ditandai dengan Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (Selisih antara rasio PAD terhadap Total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%).
- Kapasitas **Fiskal Lemah** (Pendapatan Daerah bergantung dengan Pendapatan Transfer Pusat).





## IV. ARAHAN DAN PENEKANAN

1

**Memastikan Kelancaran Operasional dalam setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024** yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada di daerah masing-masing → Secara paralel jajaran pemerintah mengikuti semua perkembangan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu dan memberi dukungan saat diperlukan.

2

**Memfasilitasi penandatanganan NPHD bagi pihak Bawaslu, TNI dan POLRI serta mendorong proses penyaluran hibah** pilkada sesuai tahapan penyaluran.

3

**Menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah dan melaksanakan pengendalian inflasi** dengan mendukung UMKM, memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok.

4

**Mempermudah Iklim Investasi** dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, promosi dan pemasaran daerah, serta membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta, baik lokal maupun asing.







**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Republik Indonesia



# TERIMA KASIH

 [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)  [Kemendagri\\_RI](#)  [kemendagri](#)  [kemendagri](#)

